

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah maupun upaya bersama dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja OPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan OPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja OPD memiliki fungsi strategis dalam sistem perencanaan daerah, karena menjadi produk perencanaan pada unit satuan kerja pemerintah yang berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat. Kualitas penyusunan Renja OPD sangat menentukan kualitas pelayanan pada publik yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Renja BPBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan BPBD untuk periode 1 (satu) tahun selama Tahun 2022. Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah wajib menyusun Renja OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan Rencana Strategis (Renstra) OPD lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen perencanaan, Renja OPD merupakan rancangan usulan APBD pada BPBD Prov Jawa Tengah dengan target yang terukur serta telah disesuaikan berdasarkan prioritas dan strategi utama guna mendukung visi dan misi BPBD Provinsi Jawa Tengah. Pengajuan Renja ini disusun secara realistis untuk mencapai tujuan pembangunan. Renja sebagai penjabaran tahunan dari renstra merupakan bentuk komitmen BPBD Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Jawa Tengah sekaligus wujud dan peran serta BPBD Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2019-2023. Dokumen tersebut menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan baik dalam perencanaan, penganggaran, pengawasan serta evaluasi kinerja.

a. Kedudukan BPBD Provinsi Jawa Tengah

Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah merupakan unsur pendukung tugas Gubernur dibidang penanggulangan bencana daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA. Susunan Organisasi Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah terdiri dari unsur pengarah dan unsur pelaksana. Unsur Pelaksana terdiri Kepala, Bagian (Bagian Tata Usaha) dan 4 (empat) bidang yaitu Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan, Bidang Penanganan Darurat, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, dan Bidang Logistik dan Peralatan,

sedangkan unsur pengarah terdiri dari unsur masyarakat professional /ahli dan unsur pejabat pemerintah daerah.

b. Tugas Pokok

Sesuai ketentuan Pasal 2, Peraturan Gubernur No. 101 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah, bahwa Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang penanggulangan bencana daerah.

c. Fungsi

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3, Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah, bahwa Sekretariat BPBD mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana.
- 2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang bencana.
- 3) Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, reahabilitasi dan rekonstruksi, logistik dan peralatan lingkup provinsi dan kabupaten/kota.
- 4) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penanggulangan bencana.
- 5) Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan BPBD.
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);
11. Peraturan Presiden Nomor 17 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada Keadaan tertentu;
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Jawa Tengah;
15. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah 2009-2029;
16. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah 2013-2018;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 101 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah;
21. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 77 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 78 tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Akibat Bencana di Provinsi Jawa Tengah.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud
 - a. Pedoman bagi BPBD Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi melalui program dan kegiatan

penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan visi dan misi Provinsi Jawa Tengah dalam RPJMD 2018-2023.

- b. Pedoman dan kerangka acuan dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan, pemantauan/monitoring, dan evaluasi di lingkungan BPBD Prov Jawa Tengah.

2. Tujuan

- a. Sebagai landasan operasional BPBD Provinsi Jawa Tengah untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) ataupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- b. Sebagai pedoman untuk monitoring sinergi dan keterkaitan dokumen perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan PB.
- c. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan pembangunan

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja BPBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020 dan Capaian Renstra PD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V Penutup

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Capaian Renstra PD

Tahun anggaran 2020, BPBD Provinsi Jawa Tengah mengelola anggaran belanja program/kegiatan sebesar Rp 22.408.318.000,- (*dua puluh dua milyar enam ratus delapan juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah*), dengan realisasi sebagaimana Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Pagu dan Realisasi Belanja APBD TA 2020

Belanja	Pagu	Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan	
		%	Rp	%	Rp
1		2	3	4	5
Belanja Tidak Langsung	6.291.267.000,-	100%	6.291.267.000	90.07%	5.729.591.000
Belanja Langsung	16.117.051.000,-	98.11%	15.811.881.500	90.75%	14.621.847.321
Total (BTL+BL)	22.408.318.000,-	98,64%	22.103.148.500	90,82%	20.351.438.321

Anggaran tersebut dialokasikan untuk pembiayaan 3 (tiga) program dan 31 (tiga puluh satu) kegiatan. Program dimaksud antara lain Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah, serta Program Penyusunan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Realisasi anggaran belanja langsung secara fisik tercapai 98,11%, dengan realisasi keuangan sebesar Rp 14.621.847.321,- (90,72%). Capaian realisasi fisik tidak mencapai 100% disebabkan terdapat 2 (dua) kegiatan tidak terlaksana sesuai dengan perencanaan, yaitu kegiatan Evaluasi Pemantauan dan Penanganan Darurat Bencana dan kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemangku Kepentingan PB dalam Kajian Kebutuhan Pasca Bencana Jateng.

Rincian kegiatan yang tidak tercapai adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan evaluasi, pemantauan, dan penanganan darurat bencana dengan nilai pagu Rp 493.850.000,-
Permasalahan: Droping air bersih hanya terlaksana sebagian, dikarenakan musim kemarau basah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota telah mengalokasikan rencana penganggaran air bersih dari APBD Kab/Kota masing-masing.
Upaya: Merencanakan kegiatan droping air bersih berdasarkan kebutuhan daerah dari kajian Daerah Rawan Kekeringan (sudah dilakukan) dan kecenderungan musim melalui data *Time Series* serta mengoptimalkan kemampuan Daerah (Pemerintah Kabupaten/Kota) dalam penyediaan Air Bersih.
- b. Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan PB dalam kajian kebutuhan pasca bencana Jateng dengan nilai pagu Rp 109.759.000,-.

Permasalahan: Kegiatan Pelatihan Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitupasna) tidak terlaksana terkendala Refokusing Anggaran pasca Covid-19.

Upaya Pemecahan: Merencanakan pelatihan melalui DARING (dalam jaringan) atau pertemuan secara online, namun tetap mengoptimalkan capaian yang diinginkan apabila situasi Pandemi belum kembali normal.

Tabel 2.2
Persandingan Program Prioritas Sekretariat BPBD Tahun 2020 dan Tahun 2021

No	Bidang Urusan	Program Prioritas Perangkat Daerah	
		Tahun 2020	Tahun 2021
(1)	(2)	(3)	(4)
1	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (TRANTIBUMLINMAS): Penanggulangan Bencana	Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kegiatan Pengembangan Masyarakat Tangguh Bencana Sub Kegiatan Pembentukan Desa Tangguh Bencana	Program Penanggulangan Bencana Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana SSK Pembentukan dan Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana

Program unggulan Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah adalah Pembentukan Desa Tangguh Bencana. Dengan diterbitkannya Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah nomenklatur Kegiatan Pembentukan Desa Tangguh Bencana semula adalah Kegiatan Pengembangan Masyarakat Tangguh Bencana berubah menjadi Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana. (Tabel 2.2)

Tabel 2.3

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah BPBD Provinsi Jawa Tengah
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah BPBD Provinsi Jawa Tengah s/d Tahun 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Tingkat Realisasi s/d Target Akhir Renstra 2018-2023 (%)	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
						Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis)	60	Bulan	12	12	12	100	40	12	12	60
	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa surat menyurat, atk, cetak penggandaan dan kearsipan perangkat daerah	60	Bulan	12	12	12	100	40	12	12	60
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	60	Bulan	12	12	12	100	40	12	12	60
	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	60	Bulan	12	12	12	100	40	12	12	60
	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	60	Bulan	12	12	12	100	40	12	12	60

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Tingkat Realisasi s/d Target Akhir Renstra 2018-2023 (%)	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
						Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	60	Bulan	12	12	12	100	40	12	12	60
	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	60	Bulan	12	12	12	100	40	12	12	60
	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	60	Bulan	12	12	12	100	40	12	12	60
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	60	Bulan	12	12	12	100	40	12	12	60
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	60	Bulan	12	12	12	100	40	12	12	60
	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah	50	Jenis	9	10	10	100	40	10	10	60

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Tingkat Realisasi s/d Target Akhir Renstra 2018-2023 (%)	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
						Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Yang Diadakan	10	Unit	0	2	5	250	50	0	5	50
	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah Unit Pakaian Dinas Yang Diadakan	300	Unit	60	68	68	100	42.67	0	128	42.67
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar	125	Orang	25	25	25	100	40	50	25	60
	Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah	Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah	10	Laporan	2	1	1	100	30	1	3	40
	Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah	60	Bulan	12	12	12	100	40	12	12	60
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	Jumlah Bulan Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Opsional Sekertariat DPRD	60	Bulan	12	12	12	100	40	12	12	60
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	100	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	25	Dokumen	5	2	2	100	28	5	5	48
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	25	Laporan	5	2	2	100	28	5	5	48

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Tingkat Realisasi s/d Target Akhir Renstra 2018-2023 (%)	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
						Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Daerah											
1	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Persentase penurunan risiko bencana	8	%	2	2	2	100	25	2	2	50
		Persentase penanganan darurat kebencanaan	100	%	100	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase rehab rekon pasca bencana	100	%	100	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase pemenuhan logistik bencana	100	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Pengembangan Masyarakat Tangguh Bencana	Jumlah desa tangguh bencana terbentuk	70	Desa	86	2	3	150	53,75	30	30	74,37
	Pemetaan dan sinergi pengurangan risiko bencana	persentase upaya PRB Jawa Tengah	30	%	10	5	5,1	100	17	20	20	117
	Pengembangan Alat Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) & Rambu Informasi Bencana Jtg	Jumlah EWS dan rambu yang terpasang	736	Unit	246	1	1	100	25,63	127	127	54,27
	Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam kesiapsiagaan/pra bencana	jumlah masyarakat siaga bencana yang terlatih	2.500	Orang	1010	150	150	100	17,69	450	450	36,83
2	Peningkatan, pengembangan kapasitas penanganan	Jumlah pemangku kepentingan /relawan muda yang dilatih	16	Angkatan	7	2	2	100	24,32	3	3	45,71

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Tingkat Realisasi s/d Target Akhir Renstra 2018-2023 (%)	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
						Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	darurat bagi pemangku kepentingan dan generasi muda											
	Pengembangan Pusdalops Jawa Tengah	Persentase masyarakat terdampak yang tertangani	100	%	10	20	20	100	100	100	100	60
	Evaluasi, Pemantauan, dan Penanganan Darurat Bencana	jumlah sarana dan prasarana darurat yang tersedia/disiapkan	11	Kegiatan	2	3	3	100	20,83	2	2	37,5
	Bintek SAR, Latihan gabungan dan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Jawa Tengah	jumlah masyarakat/relawan yang terlatih	14	Kelompok	5	2	2	100	20	3	3	40
3	Penanganan rehabilitasi pasca bencana di Jawa Tengah	persentase masyarakat terdampak yang direhab	100	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Peningkatan Kapasitas Pemangku Kepentingan PB dalam Kajian Kebutuhan Pasca Bencana Jawa Tengah	Jumlah tenaga ahli terlatih dalam penghitungan kerusakan, kerugian dan kebutuhan pasca bencana	480	Orang	100	25	0	0	20	80	80	40
	Sinergitas multisektor Penanganan pascabencana Jawa	persentase wilayah terdampak bencana yang direhab/rekon pasca bencana	100	%	100	100	20	100	100	100	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Satuan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Tingkat Realisasi s/d Target Akhir Renstra 2018-2023 (%)	Target Program dan Kegiata Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
						Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Tengah											
4	Peningkatan kapasitas logistik dan Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana	Jumlah penyediaan logistik dan persentase dapur umum yang dilaksanakan	50	Jenis	10	10	10	100	40	10	10	60
	Peningkatan kapasitas pengelolaan peralatan bencana Jawa Tengah	Jumlah penyediaan peralatan bencana dan persentase pengelolaan peralatan PB yang dilaksanakan	46	Unit	10	10	10	100	40	6	6	60

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.2.1. Capaian Kinerja Pelayanan

Capaian indikator kinerja BPBD Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam rencana strategis telah sesuai dengan target. Pencapaian tersebut diperoleh atas usaha dan kerjasama para pemangku kepentingan. Hasil capaian kinerja yang dilakukan dengan berpedoman pada dokumen rencana strategis disajikan pada tabel 2.4.

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Provinsi Jawa Tengah

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Indeks Ketahanan Daerah dalam PB			3.52	3.54	3.55	3.56	3.57	3.54	3.55	3.56	3.57	
2	Persentase penurunan risiko bencana			2	2	1	1	1	2	1	1	1	
3	Persentase penanganan darurat kebencanaan			100	100	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase rehab rekon pasca bencana			100	100	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase pemenuhan logistik bencana			100	100	100	100	100	100	100	100	100	

2.2.2. Identifikasi Lingkungan Strategis

Mendasarkan pada tugas pokok dan fungsi BPBD Provinsi Jawa Tengah, para pemangku kepentingan penanggulangan bencana yang menjadi mitra kerja BPBD Provinsi Jawa Tengah antara lain adalah:

- 1) Kementerian/Lembaga
- Kementerian/Lembaga yang berkatian langsung dengan BPBD Provinsi Jawa Tengah antara lain adalah:
- a) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
- BNPB merupakan instansi ditingkat pusat yang dibentuk atas dasar UU No. 24 Tahun 2007 serta peraturan pemerintah. BNPB merupakan lembaga teknis yang berperan dan berfungsi sebagai pembina urusan teknis bidang penyelenggaraan penanggulangan bencana secara nasional, sehingga BNPB bukan sebagai instansi vertikal, namun peran dan dukungan di bidang penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi sangat penting dan strategis bagi Jawa Tengah.
- b) Kementerian Dalam Negeri
- Melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi dan Kewilayahan, Kemendagri, BPBD merupakan binaan

administrasi pemerintahan bidang penanggulangan bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dikelola oleh Direktorat Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana. Pembinaan secara administrasi operasional telah dan terus dilakukan Ditjen BAK untuk mewujudkan tata pemerintahan yang lebih baik.

c) Kementerian/Lembaga Lain

Kebencanaan merupakan isu bersama yang tidak dapat diselesaikan oleh satu bidang urusan pemerintahan. Permasalahan kebencanaan bersifat lintas sektor/urusan dan mencakup beberapa bidang pemerintahan, sehingga perlu kerjasama lintas sektor/bidang maupun lintas wilayah. Beberapa kementerian/ lembaga yang terkait antara lain adalah Kementerian ESDM, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kesehatan, Sosial, Pekerjaan Umum, BMKG, BIG, Lapan, BPS, BPN, TNI, POLRI, Basarnas, para pemangku kepentingan PB lainnya

2) OPD teknis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

BPBD Provinsi Jawa Tengah dibentuk dan hadir sebagai wujud komitmen pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang lebih baik, terstruktur, terencana dan terpadu. Kehadiran BPBD Provinsi Jawa Tengah tidak mengambil alih peran OPD teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan kebencanaan. Sebagai contoh adalah dampak bencana dapat merusak sektor transportasi khususnya jalan dan jembatan, dengan demikian OPD teknis yaitu Dinas Bina Marga yang harus memperbaiki sektor jalan yang rusak tersebut, BPBD Provinsi Jawa Tengah bersama Dinas Bina Marga melakukan perhitungan kerusakan dan kerusakan serta estimasi kebutuhan untuk rehabilitasi maupun rekonstruksi sektor terdampak.

3) Pemerintah Kabupaten/Kota

Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 35 kabupaten/kota mempunyai tanggungjawab besar dalam rangka sinergi dan sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan di masing-masing daerah.

4) Dunia Usaha

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Peran dunia usaha melalui Tanggungjawab Lingkungan Sosial Perusahaan (TjLSP) merupakan bentuk kepedulian dan komitmen bersama untuk ikut serta dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara komprehensif.

5) Masyarakat

Masyarakat merupakan subjek bukan hanya objek terdampak bencana. Dengan kondisi alam Jawa Tengah yang mempunyai

kerawanan dan tingkat risiko tinggi, sementara kondisi masyarakat Jawa Tengah yang cukup besar, hal ini menyebabkan masyarakat Jawa Tengah harus tinggal dan hidup berdampingan dengan bencana. Oleh sebab itu pemberdayaan dan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang bencana perlu ditingkatkan untuk menciptakan masyarakat yang tangguh bencana.

Tabel 2.5
Pemangku Kepentingan dan Ekspektasi

Pemangku Kepentingan	Ekspektasi
A. Pelanggan Internal	
1. Gubernur 2. Pejabat BPBD 3. Tenaga staf	1. Sarana kerja yang memadai 2. Peluang dan peningkatan karir terbuka 3. Peningkatan kesejahteraan 4. Dukungan opsional kegiatan 5. Peningkatan kesejahteraan 6. Kejelasan pembagian tugas 7. Peningkatan kesejahteraan 8. Peluang karir 9. Respon cepat, tepat akurat
B. Pelanggan Eksternal	
1. BNPB 2. Kemendagri 3. Kementerian/Lembaga 4. OPD teknis terkait kebencanaan	1. Kinerja tinggi 2. layanan kebencanaan cepat, tanggap 3. Program tepat sasaran 4. Koordinasi 5. Dukungan sarana dan prasarana ideal
C. Pemangku Kepentingan lainnya	
1. Masyarakat 2. Akademisi / Peneliti 3. Dunia usaha	1. Tercukupinya data dan informasi kebencanaan 2. Terpenuhi kebutuhan masyarakat terdampak bencana 3. System PB berjalan dengan baik 4. Kerjasama bidang iptek 5. Dukungan dana, sarana penelitian kehutanan 6. Pemanfaatan hasil penelitian kebencanaan 7. Daerah rawan bencana 8. Iklim usaha kondusif

2.2.3. Identifikasi Faktor-Faktor Lingkungan Strategis

- 1) Penataan kelembagaan BPBD seiring dengan terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah beserta perubahannya
- 2) Penataan organisasi perangkat daerah sebagaimana diatur pada PP No.18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- 3) Sesuai dengan undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah merupakan urusan bersama, hak dan kewajiban seluruh stakeholder.
- 4) Pemerintah sebagai penanggungjawab penanggulangan bencana dengan peran serta aktif masyarakat dan lembaga usaha (platform nasional).
- 5) Merubah paradigma respons menjadi pengurangan risiko bencana.

- 6) Perlindungan masyarakat terhadap bencana dimulai sejak Pra bencana, pada saat dan pasca bencana, secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi.
- 7) Membangun masyarakat yang tangguh dalam menghadapi bencana.
- 8) Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal melalui kelembagaan yang kuat, pendanaan yang memadai, sehingga memungkinkan seluruh BPBD mempunyai kompetensi dan kapasitas yang sama dan sesuai standar kualifikasi
- 9) Integrasi dokumen rencana penanggulangan bencana dalam Rencana Pembangunan (RKP/D, RPJM/D, RPJP).
- 10) Penggunaan teknologi pemetaan memungkinkan untuk identifikasi dan inventarisasi /pendataan secara lebih efektif dan efisien.
- 11) Pendanaan sektor non-pemerintah baik masyarakat maupun lembaga usaha masih sangat terbuka.
- 12) Pembinaan kewilayahan oleh Provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah memungkinkan koordinasi dan sinergi antara pusat dan daerah.
- 13) Peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana melalui kementerian/lembaga teknis, pemanfaatan sumberdaya milik sektor swasta.
- 14) Pengembangan kapasitas lembaga BPBD melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga nasional maupun internasional.
- 15) Mekanisme penganggaran di APBD melalui dana belanja tidak terduga dan peluang belanja (Dana Alokasi Khusus Kebencanaan) oleh pemerintah pusat dan komitmen pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana bencana dengan persentase tertentu dari APBD perlu diatur melalui peraturan yang mengikat.
- 16) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai aspek penyelenggaraan penanggulangan bencana dan sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi dapat dilakukan melalui bimbingan teknis, pelatihan, kursus, dan lain-lain.
- 17) Penyusunan aplikasi, sistem informasi untuk menyimpan, dan mengelola data kebencanaan, baik kerawanan, kerentanan, kapasitas penanggulangan bencana secara baik.
- 18) Bimbingan dan pelatihan teknis untuk relawan dan masyarakat peduli bencana dan diuji melalui gladi lapang bencana secara periodik.
- 19) Perlunya pengarusutamaan paradigma pengurangan risiko bencana kepada pemangku kepentingan agar kesiapan menghadapi bencana dilakukan pada tahap pra bencana.
- 20) Bimbingan dan pelatihan penyusunan SOP, indikator kinerja dalam pengelolaan penanggulangan bencana.

2.2.4. Analisis Lingkungan Strategis

a. Analisis Lingkungan Internal

Sebagai lembaga yang dibentuk pada tahun 2008, BPBD Provinsi Jawa Tengah pada prinsipnya masih memerlukan peningkatan sumberdaya. Sumberdaya tersebut meliputi sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana penanggulangan bencana, kelembagaan dan prosedur. Faktor-faktor tersebut berperan sebagai indikator penilaian keberhasilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam penanggulangan bencana. Optimalisasi sumber daya yang dimiliki BPBD Provinsi Jawa Tengah maupun sumberdaya di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dapat dimobilisasi atas komando BPBD Provinsi Jawa Tengah harus bermanfaat untuk pencapaian tujuan organisasi sesuai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Kapasitas sumberdaya PB di BPBD Provinsi Jawa Tengah jika dibandingkan dengan tingginya intensitas bencana dan luasnya wilayah Jawa Tengah yang rawan bencana belum ideal. Pengalaman penanganan kebencanaan yang telah dilakukan selama ini merupakan pengalaman yang berharga dan strategis untuk membangun dan perbaikan sistem untuk menghadapi situasi dan tantangan yang akan datang.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana yang selama ini telah dilaksanakan pada umumnya belum terdokumentasi dengan baik. Hal ini perlu segera ditangani agar dapat menjadi pembelajaran bersama dan dapat saling berbagi pengalaman penanggulangan bencana. Dengan demikian perlu dukungan pedoman dan mekanisme *knowledge sharing*.

b. Analisis Lingkungan Eksternal

Sarana dan prasarana pendukung dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana masih belum merata dan belum ideal. Sarana dan prasarana pendukung tidak hanya yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, namun juga oleh pemerintah kabupaten/kota swasta maupun perorangan. Sumberdaya tersebut dapat dioptimalkan dalam mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Dalam konteks tanggungjawab bencana, terdapat 3 (tiga) pilar utama dalam penanggulangan bencana, yaitu pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Dunia usaha selama ini melalui dana Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TjSLP) lebih sering dimanfaatkan untuk penanganan saat darurat bencana. Sementara itu, paradigma penanggulangan bencana sekarang ini telah bergeser dari darurat kepada pengurangan risiko bencana. Dengan demikian perlu didorong agar dunia usaha dapat

berperan dalam penanggulangan bencana sejak pra bencana. Hal ini juga menjadi nilai strategis bagi dunia usaha untuk dapat lebih dekat dengan masyarakat dan mempunyai nilai investasi.

Sebagian masyarakat Jawa Tengah dikarenakan keterbatasan sumberdaya yang dimiliki, menempati daerah rawan bencana dan hidup berdampingan dengan bencana. Kesadaran terhadap bencana yang ada disekitarnya perlu ditumbuhkan agar mereka tidak menjadi korban bencana.

2.2.5. Kesimpulan Analisis Faktor Internal dan Eksternal

- a. Kesimpulan Analisis Faktor Internal
 - 1) Peningkatan kapasitas aparatur penanggulangan bencana baik ditingkat Provinsi maupun kabupaten/kota terus ditingkatkan.
 - 2) Dukungan para pemangku kepentingan agar dilibatkan pada sektor pemerintah terutama eksekutif dan legislative agar terus terpadu untuk mendukung program dan kegiatan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dalam bentuk dukungan anggaran dan pemenuhan saran dan sarana pendukung.
 - 3) Sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Jawa Tengah masih perlu ditingkatkan baik jumlah maupun kualitasnya.
 - 4) Sarana dan prasarana pendukung tidak hanya yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, namun juga oleh pemerintah kabupaten/kota swasta maupun perorangan.
 - 5) Perlu dukungan dalam bentuk pencatatan substansi penanggulangan bencana yang telah dilakukan sehingga terdokumentasi dengan baik
- b. Kesimpulan Analisis Faktor Eksternal
 - 1) Sumberdaya PB milik pemerintah, masyarakat dan dunia usaha tersedia cukup banyak namun perlu diatur dalam kesepakatan maupun peraturan agar pemanfaatannya dalam penanggulangan bencana menjadi lebih baik
 - 2) Dunia usaha selama ini lebih banyak membantu dalam penanggulangan bencana khususnya saat tanggap darurat sehingga perlu didorong upaya untuk mengikutsertakan dunia usaha sejak upaya pra bencana melalui pendidikan maupun pembangunan dibidang peningkatan kapasitas masyarakat
 - 3) Masyarakat agar terlibat secara aktif dalam penanggulangan bencana, mereka tidak hanya sebagai objek namun juga subjek dalam PB. Partisipasi masyarakat akan berdampak pada makin kuatnya percepatan ketangguhan menghadapi bencana.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai lembaga yang dibentuk pada tahun 2008, BPBD Provinsi Jawa Tengah pada prinsipnya masih pada tahapan untuk peningkatan

sumberdaya. Sumberdaya tersebut meliputi sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana PB, kelembagaan dan prosedur. Faktor-faktor tersebut merupakan indikator penilaian keberhasilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam penanggulangan bencana dan kondisi yang berkembang secara dinamis. Optimalisasi sumber daya yang dimiliki BPBD Provinsi Jawa Tengah maupun sumberdaya di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dapat dimobilisasi atas komando BPBD Provinsi. Jawa Tengah harus bermanfaat untuk pencapaian tujuan organisasi sesuai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Belum adanya persamaan persepsi, pengertian dan langkah tindak yang terencana, terkoordinasi dan terintegrasi antar institusi dalam rangka penanggulangan bencana dan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Perpres Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang mengatur struktur dan tatakerja, personil, pembiayaan, sarana dan prasarana penanggulangan bencana, mengakibatkan penyelenggaraan penanggulangan bencana belum terlaksana secara komprehensif dan terintegrasi.

Permasalahan-permasalahan yang ditemui dan perlu untuk segera disikapi secara menyeluruh antara lain adalah:

1. Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana. Hal tersebut terkait dengan keterbatasan kapasitas dalam pelaksanaan penanggulangan bencana baik pra, tanggap darurat maupun upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana.
2. Belum seluruh Kabupaten/Kota membentuk BPBD berdasarkan Perda, mengakibatkan kesulitan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
3. Belum terintegrasi dan terstandarisasinya mekanisme/sistem pelaporan data dan informasi kebencanaan di Jawa Tengah.
4. Belum memadainya dukungan anggaran BPBD Provinsi Jawa Tengah dan BPBD kabupaten/Kota. Masih tingginya ketergantungan pendanaan bantuan pemerintah pusat untuk tanggap darurat dan bantuan kemanusiaan.
5. Masih terbatasnya sarana prasarana PB seperti peralatan penanggulangan bencana, logistik, material kebencanaan yang lainnya.
6. Banyaknya desa yang termasuk daerah rawan bencana sedangkan fasilitasi pembentukan desa tangguh bencana di Jawa Tengah sangat terbatas.
7. Belum memadainya kompetensi sumberdaya manusia bidang PB di Jawa Tengah.
8. Belum memadainya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Jawa Tengah. Penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana yang tidak akurat, keterbatasan peta wilayah yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan analisa kerusakan spasial, Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian serta perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terpusat; serta Keterbatasan alokasi pendanaan bagi rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersumber dari pemerintah daerah.

9. Keterbatasan alokasi pendanaan bagi rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersumber dari pemerintah daerah.
10. Belum memadainya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Jawa Tengah.
11. Belum sinerginya penyelenggaraan penanggulangan bencana lintas sektor dan lintas wilayah.

Kapasitas sumberdaya PB di BPBD Provinsi Jawa Tengah jika dibandingkan dengan tingginya intensitas bencana dan luasnya wilayah Jawa Tengah yang rawan bencana belumlah ideal. Pengalaman penanganan kebencanaan yang telah dilakukan selama ini merupakan pengalaman yang berharga dan strategis untuk membangun dan perbaikan sistem untuk menghadapi situasi dan tantangan yang akan datang.

2.3.1. Tantangan

Penanggulangan bencana merupakan isu bersama sejalan dengan isu pengelolaan lingkungan hidup. Paradigma pengurangan risiko bencana yang menekankan pada kegiatan penanggulangan bencana dilakukan sejak dini, sejak tidak ada bencana, sangat menentukan dan dapat dilihat tingkat keberhasilannya ketika terjadi bencana. Indikator sederhananya adalah dampak negatifnya menjadi sangat kecil baik kerugian, kerusakan harta benda, dan infrastruktur maupun korban jiwa manusia.

Tingginya ancaman bencana di Jawa Tengah perlu disikapi dengan meningkatkan kesiapsiagaan aparat yang tanggap dan tangguh dalam menghadapi bencana. Sebagai salah satu bentuk kesiapan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam penanggulangan bencana adalah menyusun dokumen rencana PB pada semua jenis bencana dan disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan PB.

Data dan informasi bencana perlu dikelola dengan baik untuk menghasilkan pengetahuan dan kesadaran bersama. Pembentukan pusat informasi bencana Jawa Tengah oleh BPBD Provinsi Jawa Tengah diharapkan mampu Pusat data dan Informasi bencana dan menjadi salah satu solusi untuk menjembatani kebutuhan komunikasi dan publikasi baik secara formal maupun non formal bagi seluruh pemangku kepentingan. Hal ini merupakan salah satu implementasi undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, dan Peraturan Kepala BNPB No. 3 tahun 2008 tentang BPBD bahwa tugas dan fungsi Sekretariat BPBD adalah melaksanakan pengumpulan data dan informasi bencana di wilayahnya.

Pelaksanaan dan sinergi program dan kegiatan PB antar pemangku kepentingan harus didorong secara aktif agar dapat memberikan manfaat seluas-luasnya kepada masyarakat terutama yang menempati daerah rawan bencana. Sinkronisasi dan sinergi program kegiatan harus dilaksanakan sejak awal dalam hal keterpaduan dan keseragaman data dan informasi serta tingkat

risiko bencana di Jawa Tengah, sehingga rencana pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka mengurangi risiko-risiko tersebut melalui program-program kegiatan terfokus dan sesuai dengan prioritas dengan melibatkan potensi, sumberdaya serta anggaran yang diperlukan dalam penanggulangan bencana.

Beberapa hal yang menjadi tantangan bagi BPBD Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana di Jawa Tengah adalah:

- a. Tingkat kerawanan bencana di Jawa Tengah sangat tinggi baik bencana alam, non alam dan sosial dengan luas wilayah Jawa Tengah
- b. Pembangunan yang tidak sesuai dengan daya tampung dan daya dukung lahan, seperti aktivitas pemanfaatan lahan tanpa mempertimbangan kaidah konservasi, Rusaknya hutan dan kawasan lindung diatasnya serta beralihnya fungsi daerah tangkapan air hujan menjadi lahan terbangun menyebabkan semakin terbatasnya sumber air baku untuk air bersih karena penurunan tingkat kualitas asir permukaan dan sedimentasi
- c. Penanggulangan bencana merupakan urusan bersama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, namun dalam kenyataannya perhatian masyarakat untuk penanggulangan bencana lebih condong kepada pemerintah
- d. Belum semua regulasi mengacu pada Peraturan Daerah Jawa Tengah No 11 tahun 2009 tentang penyelenggaraan Penanggulangan bencana
- e. Penanggulangan bencana belum menjadi prioritas utama, meskipun dianggap sebagai urusan yang penting dalam pembangunan. Paradigma pengurangan risiko bencana belum sepenuhnya mejadi arus utama bagi para pemangku kepentingan sehingga keberadaan dan kinerja BPBD baru diperhatikan manakala terjadi bencana
- f. Kewenangan pemerintah Provinsi pada era otonomi daerah pada dasarnya tidak dapat mengintervensi pemerintah kabupaten/kota namun untuk penanggulangan bencana alasan kemanusiaan intervensi masih dapat dilakukan
- g. Belum optimalnya kualitas sumberdaya para aparatur pemangku kepentingan, pelaku penanggulangan bencana dalam penanganan darurat bencana,
- h. Sumberdaya manusia di BPBD Provinsi Jawa Tengah sangat terbatas dan tidak ada penambahan jumlah pegawai secara signifikan, kompetensi pegawai yang ada belum sebanding dengan cakupan kinerja penyelenggaraan PB yang sangat luas. Distribusi kompetensi pegawai yang ada masih belum ideal antara kompetensi dengan bidang/ tanggungjawab pekerjaan.
- i. Penganggaran dalam kebencanaan masih mengikuti prosedur normative, sebagaimana penganggaran rutin, padahal untuk kebencanaan diperlukan terobosan dan lebih persuasive

terutama untuk kondisi darurat ataupun memerlukan pendanaan khusus, segera/mendesak

- j. Kurangnya penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk teknologi bidang komunikasi dan informasi di pemerintah daerah;
- k. Basis data bidang penanggulangan bencana belum tertata secara rapi dan tertib, adanya beberapa aplikasi untuk penunjang pengelolaan data masih belum diimbangi dengan belum ketelitian, kelengkapan supply data dari daerah,
- l. Partisipasi masyarakat sudah cukup tinggi namun masih belum ada standarisasi terutama untuk para relawan
- m. Partisipasi dunia usaha melalui alokasi anggaran CSR masih belum terkelola untuk Penanggulangan bencana secara menyeluruh dan komprehensif terutama untuk pra dan pasca bencana. Bantuan dunia usaha lebih banyak dialokasikan untuk tanggap darurat.
- n. Masih rendahnya pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan penggunaan lahan khususnya di kawasan lindung dan daerah resapan air

2.3.2. Peluang

Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan urusan bersama, hak dan kewajiban seluruh stakeholder diatur. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, BPBD Provinsi Jawa Tengah mempunyai 3 (tiga) fungsi utama PB yaitu sebagai pelaksana, koordinasi dan komando.

- a. Sebagai pelaksana, BPBD Provinsi Jawa Tengah memiliki peran untuk memberikan perlindungan masyarakat melalui upaya penanggulangan dan pengurangan risiko bencana baik pra, saat maupun pasca bencana.
- b. BPBD berfungsi sebagai leading sektor dan mengkoordinasikan dengan OPD Teknis, seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas PSDA dan Tata ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman dan dinas lain yang terkait dalam bidang pekerjaan teknis. BPBD mengkoordinasikan program terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pra, saat maupun pascabencana yang dilakukan oleh OPD teknis. OPD tersebut dalam struktur organisasi BPBD termasuk dalam OPD unsur pengarah. Pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait penanggulangan bencana dilaksanakan oleh masing-masing OPD namun berkoordinasi secara efektif dengan BPBD sehingga saling menunjang antara pembangunan fisik/infrastruktur dan aman berdasarkan pada aspek kebencanaan.
- c. Fungsi komando melekat pada BPBD untuk memberikan komando kepada para pemangku kepentingan untuk memobilisasi sumberdaya untuk penanggulangan bencana, terutama pada saat darurat bencana. Dengan peran sebagai

incident commander, BPBD memberikan komando untuk melakukan evakuasi, penyelamatan dan pada saat yang bersamaan OPD teknis melakukan perbaikan dan rehabilitasi sarana dan prasarana penting dan vital dengan segera.

Perubahan iklim merupakan suatu isu lintas-sektoral, dan membutuhkan koordinasi antar dan intra-sektoral, oleh karena itu peningkatkan kerja sama dan koordinasi antara lingkungan, ekonomi, pembangunan, energi, pertanian, perikanan, peternakan dan sektor kehutanan merupakan hal yang sangat penting.

Peningkatan kemampuan dan kesadaran masyarakat juga menjadi tantangan dalam menghindari dampak merugikan dari perubahan iklim. Dengan prakarsa ini, diharapkan bahwa strategi regional dalam adaptasi dan mitigasi akan dikembangkan dan disiapkan untuk mengantisipasi ancaman terhadap ketahanan pangan akibat dampak perubahan iklim

Sebagai urusan bersama, penanggulangan bencana mempunyai beberapa peluang untuk menjadi program yang penting dan prioritas. Dalam system penanggulangan bencana yang dibangun secara nasional terdapat 5 (lima) unsur yang perlu dibenahi dan menjadi perhatian, yaitu:

a. Legislasi,

Di tingkat pusat dilakukan atas dasar Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Dalam Negeri maupun Peraturan Kepala BNPB.

Di tingkat Provinsi ataupun kabupaten/kota peraturan dan petunjuk teknis terkait penanggulangan bencana masih cukup minim, sehingga dapat mengacu pada peraturan di tingkat pusat. Upaya yang dilakukan pada prioritas di Jawa Tengah adalah penyusunan lembaga BPBD dengan peraturan daerah dan peraturan daerah untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana

b. Perencanaan

Perencanaan dalam penanggulangan bencana dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Perencanaan untuk semua jenis bencana, yaitu rencana penanggulangan bencana (RPB), yang selanjutnya dijabarkan menjadi rencana aksi.
- 2) Perencanaan untuk 1 (satu) jenis bencana, yaitu:
 - a) Rencana mitigasi, disusun pada tahap pra bencana tanpa potensi bencana, satu jenis bencana, upaya mitigasi (struktural dan non struktural), siapa melakukan apa, anggaran.
 - b) Rencana kontijensi, disusun pada tahap pra bencana dengan potensi bencana, satu jenis bencana, gunakan skenario kejadian yang paling mungkin, siapa melakukan apa, anggaran, dokumen komitmen antar stakeholder.

Pada saat darurat, rencana konyinjensi diaktivasi menjadi rencana operasi sesuai dengan kondisi lapangan.

- c) rencana pemulihan, pasca bencana, dasar wilayah terdampak, apa saja yang dipulihkan, siapa melakukan apa, anggaran.

c. Kelembagaan

Kelembagaan penanggulangan bencana dapat dibedakan atas kelembagaan formal (BNPB, BPBD) dan kelembagaan non formal, seperti Platform Nasional PRB atau disingkat Planas PRB, Forum PRB Provinsi atau Forum PRB Kabupaten/Kota, Forum Merapi, Forum Slamet.

d. Pengembangan kapasitas

Kerangka Pengurangan Risiko Bencana pasca 2015 telah diadopsi pada saat penyelenggaraan Konferensi Dunia ke-3 untuk Pengurangan Risiko Bencana, yang dilaksanakan pada tanggal 14-18 Maret 2015 di Sendai, Miyagi, Jepang. Selama Konferensi, seluruh negara peserta juga menegaskan komitmen mereka untuk pengurangan risiko bencana dan pembangunan ketahanan bencana yang harus ditangani secara serius dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan dan, jika perlu, untuk diintegrasikan ke dalam kebijakan, perencanaan, program kerja, dan anggaran di semua tingkat dan dipertimbangkan dalam kerangka yang relevan. Kesepakatan dan hasil konferensi tersebut merupakan Kerangka aksi yang dikenal dengan Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana (*Sendai Framework for Disaster Risk Reduction/SFDRR*) merupakan kesepakatan internasional dalam rangka pengurangan risiko bencana tahun 2015-2030 sebagai lanjutan dari Kerangka Aksi Hyogo (*Hyogo Framework for Action*). Hasil yang diharapkan sampai dengan 15 tahun dari SFDRR adalah Pengurangan secara signifikan risiko dan kerugian akibat bencana.

1) Tujuan

- a) Mencegah timbulnya dan mengurangi risiko
- b) Mencegah dan menurunkan keterpaparan dan kerentanan
- c) Meningkatkan resiliensi melalui peningkatan kesiapsiagaan, tanggapan dan pemulihan

2) Target:

- a) Mengurangi kematian rata-rata per 100.000
- b) Mengurangi orang terdampak rata-rata per 100.000
- c) Mengurangi kerugian ekonomi / GDP
- d) Mengurangi kerusakan infrastruktur kunci
- e) Meningkatkan jumlah Negara dengan strategi dan rencana PRB
- f) Meningkatkan kerjasama internasional
- g) Meningkatkan cakupan dan akses terhadap EWS

3) Tindakan prioritas

- a) Memahami risiko bencana

Kebijakan dan praktek harus didasarkan pada pemahaman kerentanan, kapasitas, aparan, karakteristik bahaya dan lingkungan

- (1) Mendorong pengumpulan, manajemen dan akses ke informasi risiko
- (2) Gunakan dasar, data berbasis lokasi
- (3) Statistik kerusakan & kerugian
- (4) Mengoptimalkan IPTEK
- (5) Meningkatkan kesadaran
- (6) Gunakan informasi risiko untuk kebijakan pembangunan & PRB

b) Penguatan tata kelola risiko

Tata kelola yang diperlukan untuk mendorong kerjasama kemitraan mekanisme, lembaga, untuk pelaksanaan PRB dan Sumberdaya

- (1) Mengarusutamakan dan mengintegrasikan PRB di semua sektor
- (2) Mengadopsi strategi, rencana, peran tugas
- (3) Menetapkan insentif bagi kepatuhan, pemantauan dan pelaporan
- (4) Memberdayakan daerah
- (5) Mempromosikan kebijakan, standar, kemitraan

c) Investasi PRB untuk Resiliensi

Investasi publik dan swasta dalam tindakan struktural dan non-struktural untuk meningkatkan ketahanan sebagai pendorong inovasi, pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja

- (1) Mengalokasikan sumber daya untuk semua tingkatan dan sektor
- (2) Meningkatkan infrastruktur kritis
- (3) Mempromosikan tindakan-tindakan non-struktural, misalnya standar, kesehatan, jaring pengaman sosial, pengungsian
- (4) Mengintegrasikan PRB dalam instrumen fiskal dan keuangan dan menggali *risk sharing* dan *Transfer*
- (5) Meningkatkan ketahanan bisnis
- (6) Melindungi mata pencaharian, pariwisata, dll

d) Meningkatkan manajemen risiko

Memperkuat kesiapsiagaan, respon dan pemulihan di semua tingkatan sebagai kesempatan penting untuk PRB dan integrasinya ke dalam pembangunan

- (1) Kesiapan dan kebijakan, rencana, program
- (2) *People-centred multi-hazard*, ramalan & EWS
- (3) Mempromosikan ketahanan masyarakat, layanan infrastruktur
- (4) Bantuan & pemulihan pendanaan, koordinasi, prosedur
- (5) Mengembangkan hukum, panduan, prosedur, mekanisme

Meskipun HFA sudah digantikan dengan SFDRR namun agenda HFA yang masih belum optimal masih terus ditingkatkan dan capaian dan target HFA tetap dilanjutkan dengan beberapa penekanan yang menjadi fokus utama.

e) Pendanaan

Pendanaan dalam penanggulangan bencana dikelompokkan dalam 2 (dua) kategori, yaitu:

- 1) Pendanaan dari pemerintah.
 - a. Kegiatan rutin dan operasional untuk pengurangan risiko bencana digunakan dana DIPA (dana dekonsentrasi, tugas pembantuan) termasuk Dana Alokasi Khusus,
 - b. Kegiatan penanganan kesiapsiagaan dengan Dana Kontinjensi
 - c. Dana Siap Pakai (DSP)/ON CALL;
Digunakan untuk bantuan kemanusiaan untuk penanganan dan siaga darurat bencana.
 - d. Kegiatan pemulihan (rehabilitasi dan rekonstruksi) pasca bencana dengan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah digunakan untuk mengembalikan dan memperbaiki fungsi sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana. Prinsip rehabilitasi dan rekonstruksi untuk membangun dengan lebih baik dan aman (*build back better and safer*)
- 2) Pendanaan dari masyarakat, merupakan dana yang dikumpulkan oleh masyarakat, baik organisasi masyarakat (Ormas), perguruan tinggi, media massa, maupun masyarakat internasional.

Mendasarkan permasalahan, tantangan dan peluang-peluang yang ada, maka isu-isu prioritas antara lain adalah:

1. Masih terdapat 2 (dua) Kota yang belum membentuk BPBD berdasarkan Perda, mengakibatkan kesulitan koordinasi program dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
2. Belum terintegrasi dan terstandarisasinya mekanisme/sistem pelaporan data dan informasi kebencanaan di Jawa Tengah,
3. Belum memadainya dukungan anggaran BPBD Provinsi Jawa Tengah dan BPBD kabupaten/Kota
4. Kapasitas gedung untuk menyimpan logistik dan peralatan bencana belum optimal
5. Masih terbatasnya sarana peralatan dan mobilitas penanggulangan bencana
6. Masih terbatasnya ketersediaan logistik, guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana di Jawa Tengah
7. Belum lengkapnya pedoman dan dokumen penyelenggaraan penanggulangan bencana di Jawa Tengah

8. Belum terfasilitasinya pembentukan desa tangguh bencana di Jawa Tengah dibandingkan dengan banyaknya desa yang rawan dan risiko bencana
9. Belum memadainya kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulangan bencana di Provinsi Jawa Tengah
10. Belum memadainya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Jawa Tengah
11. Belum memadainya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Jawa Tengah
12. Belum sinerginya penyelenggaraan penanggulangan bencana lintas sektor dan lintas wilayah

Mendasarkan uraian diatas, maka peluang yang dapat disiasati untuk mendukung program penanggulangan bencana di Jawa Tengah antara lain:

1. Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Tujuan dan sasaran yang telah dicapai adalah untuk meningkatnya Upaya Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pengurangan Risiko Bencana. Program dan kegiatan utama yang dilakukan antara lain :

- a. Kegiatan Penyusunan Peta Resiko Bencana Provinsi Jawa Tengah
- b. Kegiatan Pembentukan Desa Tangguh Bencana
- c. Kegiatan Gladi Manajemen Bencana
- d. Kegiatan Pengembangan Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Provinsi Jawa Tengah
- e. Kegiatan Identifikasi dan Sosialisasi Daerah Rawan Bencana
- f. Kegiatan Koordinasi Pengurangan Risiko Bencana (PRB)
- g. Kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Kawasan Gunung api
- h. Kegiatan Koordinasi Pengembangan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk Reduksi Bencana
- i. Kegiatan Penyusunan Rencana Kontinjensi (Contingency Plan)
- j. Kegiatan Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK)
- k. Kegiatan Pemasangan Rambu Jalur Evakuasi pada Daerah Rawan Bencana
- l. Kegiatan Sistem Peringatan Dini Bencana Tanah Longsor (Early Warning System) berbasis Masyarakat

2. Penanganan Darurat

Tujuan dan sasaran: Meningkatkan Penyelamatan dan Evakuasi Terhadap Korban Bencana, Penanganan Pengungsi dan Pemulihan Sarana dan Prasarana Vital untuk Aktivitas masyarakat. Program dan kegiatan utama yang dilakukan antara lain :

- a. Kegiatan Binte SAR dan Latihan Gabungan Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Pengungsi
- b. Kegiatan Pengembangan PUSDALOPS Tanggap Darurat / SAR Melaksanakan dan menyiapkan sarana dan prasarana pengendalian operasional kegiatan kedaruratan bencana
- c. Kegiatan SAR Pada Event Angkutan Lebaran, Natal, Tahun Baru dan Sedekah laut/Sura

Antisipasi dan partisipasi BPBD Jawa Tengah dalam berbagai event kegiatan kemasyarakatan yang bersifat kebudayaan maupun keagamaan terutama pada event lebaran dan sura /sedekah laut dan terlibat dalam posko gabungan natal dan tahun baru

- d. Kegiatan Evaluasi, Pemantauan, dan Penyusunan Pedoman Penanganan Darurat

Kesiapan pemerintah menghadapi ancaman bencana di Jawa Tengah serta pemenuhan kebutuhan air baku masyarakat terdampak bencana (kekeringan)

- e. Kegiatan Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama Data dan Informasi Bencana (Posko).

Posko dilakukan melalui sistem piket petugas selama 24jam/7 hari dengan selama 1 tahun penuh untuk memperkuat komunikasi, koordinasi, konsolidasi dan pelaporan kejadian bencana

- f. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Tim Reaksi Cepat Bencana

3. Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Tujuan dan sasaran: Meningkatkan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana melalui Perbaikan, Pemulihan, Peningkatan dan Pembangunan yang Lebih Baik. Program dan kegiatan utama yang dilakukan antara lain :

- a. Inventarisasi Data Kerusakan Infrastruktur Terdampak Bencana
- b. Koordinasi Teknis Penanggulangan Bencana
- c. Koordinasi Penanganan Rehabilitasi Pasca Bencana di Jawa Tengah
- d. Koordinasi Penanganan Rekonstruksi Pasca Bencana di Jawa Tengah Manfaat dan Dampak Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
- e. Pemulihan dan Peningkatan Sosial dan Ekonomi PascaBencana
- f. Pelatihan Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA)
- g. Sinergitas Multisektor Pasca Bencana di Jawa Tengah

4. Logistik dan Peralatan

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana, Peralatan dan Logistik Bencana. Program dan kegiatan utama yang dilakukan antara lain :

- a. Pengadaan Logistik dan Peralatan Bencana, dilakukan pada saat tidak ada bencana dan bahan logistik dan peralatan difungsikan sebagai antisipasi dan *buffer stock* logistik kebencanaan. Stok logistik tersebut didorong di Kabupaten/Kota dan Bakorwil untuk mempermudah mobilisasi dan dropping logistik ke lokasi bencana.
- b. Kegiatan Koordinasi, dan Konsolidasi Logistik Bencana, dilaksanakan sebagai bentuk saling koordinasi antar kabupaten/kota.
- c. Koordinasi Pemetaan dan Monitoring Evaluasi Peralatan PB Dilaksanakan untuk memantau dan memberikan pendampingan agar pengelolaan logistik dan peralatan bencana sesuai dengan standar dan memenuhi kriteria yang aman penyimpanan.
- d. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Peralatan Bencana Jawa Tengah Merupakan sarana koordinasi dan komunikasi antar BPBD sebagai wujud tanggung jawab bersama dalam kebencanaan.

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Tahun 2019 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, namun hingga tersusunnya dokumen RKPD ini, RPJMD 2018-2023 belum ditetapkan, sehingga penyusunan dokumen RKPD 2019 berpedoman pada RPJPD Jawa Tengah Tahun 2005-2025, memperhatikan kesinambungan dengan dokumen RPJMD 2013-2018, serta mengacu pada RPJMN Tahun 2015 – 2019 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional. Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 Tahap III (2014 – 2019). Visi pembangunan dalam RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 yaitu “Jawa Tengah Yang Mandiri, Maju, Sejahtera dan Lestari”.

Pembangunan daerah Tahun 2019 merupakan tahun terakhir Tahap III RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025, yang diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan dasar, peningkatan daya saing ekonomi rakyat, peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, serta peningkatan kualitas dan pengelolaan sumber daya alam.

Pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2019 diarahkan pada upaya pencapaian sasaran dan target akhir tahap III pembangunan jangka panjang tahun 2015-2019. Dengan memperhatikan hasil kinerja pembangunan tahun sebelumnya, berbagai permasalahan dan isu strategis serta kebijakan pembangunan nasional, maka kebijakan pembangunan daerah tahun 2019 ditujukan untuk “Peningkatan Daya Saing Daerah Melalui Pemerataan Pembangunan Dan Pemanfaatan Iptek”. Guna percepatan pencapaian tujuan pembangunan daerah tahun 2019 tersebut, ditetapkan prioritas pembangunan daerah tahun 2019, meliputi: (1) Penanggulangan kemiskinan; (2) Penguatan daya saing ekonomi daerah; (3) Kualitas hidup dan daya saing SDM; (4) Pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana; (5) Ketahanan pangan dan energi; (6) Kesenjangan wilayah; serta (7) Tata kelola pemerintahan.

Prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 tersebut dijabarkan lebih rinci dalam fokus pembangunan, yaitu sebagai berikut:

1. Penanggulangan kemiskinan, difokuskan pada:
 - a. Penyediaan *basic life access* untuk penduduk miskin perkotaan dan perdesaan melalui penanganan perumahan dan penyehatan lingkungan permukiman (RTLH, sanitasi, air bersih, listrik); penanganan kawasan permukiman kumuh; peningkatan akses pendidikan, kesehatan, pangan; pemberdayaan dan perlindungan sosial bagi PMKS; dan kepemilikan administrasi kependudukan.
 - b. Penguatan *sustainable livelihood* melalui keberantaraan akses terhadap asset, modal, manajemen dan pasar; peningkatan *start up* wirausaha baru; peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja berkelanjutan.
 - c. Penguatan basis data, basis spasial, berbasis komunitas dan pendampingan yang kontinyu, serta gotong royong pelibatan

seluruh komponen potensi (swasta dan pihak lainnya) dalam kesetiakawanan sosial.

2. Penguatan daya saing ekonomi daerah, difokuskan pada:

- a. Peningkatan produktivitas pertanian dan perkebunan melalui peningkatan kemampuan petani dalam budidaya pertanian; asuransi petani; peningkatan prasarana sarana pertanian termasuk jaringan irigasi; pengembangan teknologi tepat guna di bidang pertanian dan perkebunan; revitalisasi peran balai pertanian.
- b. Peningkatan kualitas produk pertanian yang berdaya saing melalui peningkatan kemampuan petani dalam pengolahan produk pertanian untuk meningkatkan nilai tambah; serta didukung dengan pengembangan jejaring pemasaran berbasis kelompok (*corporate farming*).
- c. Peningkatan produksi dan kualitas hasil perikanan melalui peningkatan kapasitas nelayan; peningkatan prasarana dan sarana perikanan tangkap (alat tangkap ramah lingkungan, kapal, TPI); perbaikan kualitas benih dan pakan ikan mandiri; peningkatan kualitas dan kapasitas unit pengolahan ikan untuk ekspor.
- d. Optimalisasi potensi sumber daya hutan melalui peningkatan kualitas tata kelola kehutanan; penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK); peningkatan keterlibatan masyarakat sebagai mitra usaha kehutanan (hutan tanaman rakyat, hutan rakyat); peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengolahan hasil hutan; serta pemanfaatan sumber daya hutan non kayu.
- e. Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil, mikro, dan menengah melalui peningkatan nilai tambah dan diversifikasi produk; hilirisasi industri; mengembangkan inovasi teknologi produksi; keberantaraan akses modal dari perbankan dan lembaga keuangan non perbankan; peningkatan akses pasar dengan mengembangkan digital ekonomi; pengembangan kawasan industri; keberantaraan kemitraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan industri besar; fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk UMKM; serta peningkatan infrastruktur jaringan produksi, distribusi, promosi perdagangan antar daerah Provinsi di Indonesia.
- f. Pengembangan inovasi teknologi dengan pengembangan *Technopark* serta peningkatan kreativitas dan inovasi masyarakat.
- g. Peningkatan pariwisata berbasis masyarakat melalui perbaikan prasarana dan sarana, serta manajemen pengelolaan daerah wisata, dan meningkatkan kapasitas pelaku pariwisata; peningkatan promosi wisata; kerjasama dengan pelaku wisata; aksesibilitas menuju daerah tujuan wisata; serta peran serta swasta dan masyarakat dalam industri pariwisata.
- h. Perbaikan iklim investasi yang semakin kondusif melalui pemberian kemudahan perijinan investasi (perijinan satu pintu, waktu perijinan, dan prosedur perijinan); perbaikan sistem dan layanan perijinan mudah, murah, cepat, tepat; kebijakan investasi sejalan

dengan prioritas daerah untuk pengurangan kemiskinan dan peningkatan daya saing wilayah; pengembangan *digital investment promotion*; pengembangan investasi berbasis produk-produk unggulan kabupaten/kota; serta mendorong perwujudan investasi hijau.

3. Kualitas hidup dan daya saing Sumberdaya Manusia (SDM), difokuskan pada:
 - a. Perbaikan kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan melalui peningkatan keterjangkauan biaya pendidikan melalui sekolah gratis untuk pendidikan menengah dan khusus; pengembangan kurikulum berbasis *skill, knowledge, attitude*; pengembangan *learning culture*; penguatan pendidikan kejuruan dan vokasi standar nasional dan/atau standar internasional; meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik; meningkatkan manajemen mutu penyelenggaraan pendidikan; mengoptimasi peran lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam mendukung pengembangan pendidikan; mengefektifkan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam membangun strategi peningkatan kualitas pendidikan; pengembangan teknologi informasi dalam mendukung pengembangan pendidikan; dan peningkatan pengembangan pendidikan khusus dan inklusi sesuai kewenangan Provinsi.
 - b. Peningkatan upaya promotif dan preventif dengan tetap memperbaiki upaya kuratif dan rehabilitatif melalui peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan; peningkatan dan pemerataan prasarana dan sarana kesehatan; pengembangan SIM RS Rujukan *Online*; peningkatan kualitas dan pemerataancakupan tenaga kesehatan; serta peningkatan capaian wilayah *Open Defecation Free* (tidak buang air besar sembarangan).
 - c. Mempersiapkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi, kualifikasi, dan berdaya saing tinggi melalui penguatan program pendidikan *link and match* berbasis *demand-driven*; mendorong peningkatan keterampilan dan keahlian tenaga kerja berbasis kompetensi (standar, pelatihan, sertifikasiberstandar nasional dan/atau internasional); sertifikasi kompetensi berstandar nasional dan/atau internasional bagi lulusan pendidikan vokasi; memperluas akses informasi pendidikan kejuruan dan vokasi dalam mendukung *demand* tenaga kerja ke depan; mendorong kebijakan pengembangan pusat-pusat ekonomi baru; mengembangkan budaya inovatif; dan mendorong kebijakan afirmatif untuk pemanfaatan tenaga kerja lokal.
 - d. Pemanfaatan Bonus Demografi melalui peningkatan kualitas penduduk usia produktif (15-64 Tahun) yang didukung peran lintas sektor/program antara lain pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan investasi.
 - e. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak, serta pembangunan keluarga melalui peningkatan keterlibatan

perempuan dalam proses politik dan jabatan publik; peningkatan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak; peningkatan kesejahteraan dan perlindungan hak anak; serta peningkatan bina keluarga balita, bina keluarga remaja dan bina keluarga lansia.

- f. Peningkatan peran serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) melalui penguatan pengetahuan dan ketrampilan dalam mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
 - g. Pengembangan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi untuk peningkatan minat dan budaya baca masyarakat.
 - h. Peningkatan kesadaran dan pemberdayaan kepemudaan melalui peningkatan dan pengembangan generasi muda mandiri dan berdikari, pengembangan kepedulian dan kepeloporan pemuda dalam pembangunan, peningkatan daya tangkal pemuda terhadap pengaruh destruktif, pemberdayaan organisasi kepemudaan dan kepramukaan.
 - i. Pembibitan, pembinaan dan pemasyarakatan serta kelembagaan olahraga melalui penyelenggaraan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLOP), penyelenggaraan kuantitas dan kualitas kompetisi olahraga berkelanjutan, pengembangan olahraga unggulan daerah, peningkatan partisipasi masyarakat dalam berolahraga dan pembudayaan/pemassalan olahraga, peningkatan kualitas sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan, peningkatan mutu dan manajemen organisasi olahraga, dan pengembangan industri olahraga.
 - j. Pembinaan dan pengembangan kebudayaan melalui pengembangan seni budaya, pelestarian cagar budaya, dan pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
4. Pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana, difokuskan pada:
- a. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui rehabilitasi hutan dan lahan, perhutanan sosial, konservasi daerah hulu dan tangkapan air berbasis pemberdayaan masyarakat; perkuatan Lembaga Masyarakat Di sekitar Hutan (LMDH); pengelolaan sumber daya air dengan konservasi sumber air, pengendalian banjir, pengendalian pemanfaatan air tanah; pengelolaan, pengendalian perijinan dan pengawasannya pertambangan; pengelolaan wilayah pesisir dengan rehabilitasi kawasan mangrove, terumbu karang dan pesisir; pengelolaan lingkungan dengan pengendalian pencemaran air, tanah, dan udara, pengelolaan limbah secara komunal berbasis kawasan dan masyarakat, serta peningkatan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. Penanggulangan bencana berbasis pengurangan risiko bencana melalui peningkatan kapasitas, memperkuat kebijakan dan kelembagaan, pengembangan sistem informasi, penanganan tematik daerah rawan bencana, memperkuat kesiapsiagaan dan

penanganan darurat, serta mengembangkan sistem rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

5. Ketahanan Pangan dan Energi, dengan fokus pada:
 - a. Perwujudan ketahanan pangan masyarakat dan daya saing pangan melalui peningkatan ketersediaan pangan dengan mempertahankan luasan lahan pertanian; penyediaan infrastruktur pengolahan, penyimpanan, meningkatkan kewirausahaan, manajemen dan bisnis petani serta distribusi pangan; peningkatan aksesibilitas pangan dengan menjaga stabilitas harga dan pasokan; peningkatan konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) dengan pengembangan diversifikasi pangan, membangun kesadaran masyarakat terhadap pangan beragam, serta peningkatan kuantitas, nilai tambah dan keragaman produk pangan; peningkatan mutu dan keamanan pangan; Pengembangan dan penerapan inovasi teknologi paska panen.
 - b. Pemerataan akses energi dan listrik melalui penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan dengan meningkatkan koordinasi dengan PLN sebagai penyedia jaringan listrik dan pengembangan listrik perdesaan; pengembangan listrik murah dan hemat; pengembangan energi baru terbarukan dengan pemanfaatan biogas, biomassa, gas rawa, mikro hidro dan tenaga surya; serta budaya hemat energi.
6. Kesenjangan wilayah, dengan fokus pada:
 - a. Penguatan infrastruktur konektivitas melalui peningkatan kehandalan dan keselamatan jalan-jembatan mendukung pengembangan kawasan strategis dan pemerataan antara wilayah,serta menghubungkan pantura-pansela dan daerah perbatasan; pengembangan angkutan umum lintas regional, perkotaan-perdesaan; peningkatan sarana prasarana simpul dan pemaduan moda transportasi (terminal, pelabuhan, bandara, dan stasiun).
 - b. Pemerataan prasarana sarana dasar dan ekonomi melalui penyediaan rumah umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah; peningkatan jaringan air minum layak berbasis kawasan dan masyarakat; meningkatkan kualitas dan kapasitas pasar, pusat perdagangan, dan pusat jasa lainnya.
 - c. Menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di wilayah selatan, barat dan timur yang diwujudkan dengan penetapan kawasan peruntukan industri baru wewenang Provinsiinsi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRWP) dan dukungan dana untuk pengembangannya serta meningkatkan peran dan fungsi perkotaan yang semula Pusat Kegiatan Lokal (PKL) menjadi Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp).
7. Tata kelola Pemerintahan, difokuskan pada:
 - a. Peningkatan pelayanan publik dengan membangun pemerintah yang melayani melalui upaya perkuatan keterbukaan informasi, transparansi, serta mendorong partisipasi publik;

- b. Perwujudan pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang inovatif, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam birokrasi; membangun sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja melalui penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; meningkatkan pengawasan melalui perkuatan kapabilitas Aparatur Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP) dan perkuatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP); meningkatkan pengendalian produk hukum, dan penegakkan perda; meningkatkan profesionalisme ASN melalui peningkatan kinerja, kompetensi, disiplin, dan penataan ASN;
- c. Perwujudan kelembagaan birokrasi yang profesional melalui perbaikan tata laksana organisasi; peningkatan efisiensi dan efektivitas kelembagaan dengan melakukan evaluasi berkala pada kinerja kelembagaan menuju struktur berbasis kinerja; peningkatan profesionalisme ASN dalam upaya - upaya *clean and clear government* dan menerapkan “keperantaraan dan *enterpreuneur*” dalam tata kelola pemerintahan.
- d. Peningkatan kualitas kehidupan demokrasi dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan serta kondusivitas wilayah Jawa Tengah dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Pemilu Legislatif.

Arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 merupakan upaya untuk mencapai target sasaran pembangunan Tahun 2019 yang meliputi:

- a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 – 5,6%;
- b. Inflasi sebesar $4 \pm 1\%$;
- c. PDRB/Kapita sebesar Rp. 28,6 juta;
- d. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,33 - 4,43%;
- e. Kemiskinan sebesar 11,01 - 12,01%.

Tabel 2.6

Reviu Terhadap Rancanagan Awal RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

No	Rancangan Awal RKPD				Pagu Indikatif (Rp.000)	Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana (Rp.000)	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian		Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA										
I.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi										
1.	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	35 Kab/ Kota	Jumlah dokumen KRB yang disusun			Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	35 Kab/ Kota	Jumlah dokumen KRB yang disusun			
2.	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	35 Kab/ Kota	Jumlah desa yang teridentifikasi rawan bencana	60 Desa	1.250.000	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	35 Kab/ Kota	Jumlah desa yang teridentifikasi rawan bencana	60 Desa	1.250.000	
II.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana										
1.	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Semarang	Jumlah dokumen RPB yang disusun	-	-	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Semarang	Jumlah dokumen RPB yang disusun	-	-	
2.	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	35 Kab/ Kota	Jumlah Komunitas PB yang dilatih	5 Keg	385.000	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	35 Kab/ Kota	Jumlah Komunitas PB yang dilatih	5 Keg	385.000	
3.	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana		Jumlah kegiatan pelatihan penggunaan peralatan PB yang	1 Keg	300.000	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana		Jumlah kegiatan pelatihan penggunaan peralatan PB yang diselenggarakan	1 Keg	300.000	

No	Rancangan Awal RKPD				Pagu Indikatif (Rp.000)	Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana (Rp.000)	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian		Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			diselenggarakan								
			Jumlah penyediaan peralatan bencana (unit)	10 Unit				Jumlah penyediaan peralatan bencana (unit)	10 Unit		
4.	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	35 Kab/ Kota	Jumlah EWS yang dipasang dan Rambu yang dipasang	33 Unit	300.000	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	35 Kab/ Kota	Jumlah EWS yang dipasang dan Rambu yang dipasang	33 Unit	300.000	
5.	Pengelolaan Risiko Bencana	35 Kab/ Kota	Jumlah kegiatan pengelolaan risiko bencana yang diselenggarakan	0 Keg	-	Pengelolaan Risiko Bencana	35 Kab/ Kota	Jumlah kegiatan pengelolaan risiko bencana yang diselenggarakan	0 Keg	-	
6.	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	35 Kab/ Kota	Jumlah desa tangguh bencana terbentuk	7 Desa	400.000	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	35 Kab/ Kota	Jumlah desa tangguh bencana terbentuk	7 Desa	400.000	
7.	Penanganan Pascabencana Provinsi	35 Kab/ Kota	Jumlah kegiatan monev rehab rekon yang dilaksanakan	35 Kab/ Kota	100.000	Penanganan Pascabencana Provinsi	35 Kab/ Kota	Jumlah kegiatan monev rehab rekon yang dilaksanakan	35 Kab/ Kota	100.000	

No	Rancangan Awal RKPD				Pagu Indikatif (Rp.000)	Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana (Rp.000)	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian		Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah tenaga ahli terlatih dalam penghitungan kerusakan, kerugian dan kebutuhan pasca bencana	100 Org	150.000			Jumlah tenaga ahli terlatih dalam penghitungan kerusakan, kerugian dan kebutuhan pasca bencana	100 Org	150.000	
8.	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	35 Kab/ Kota	jumlah masyarakat/relawan yang terlatih	2 Kel	100.000	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	35 Kab/ Kota	jumlah masyarakat/relawan yang terlatih	2 Kel	100.000	
			Jumlah pemangku kepentingan /relawan muda yang dilatih	2 Angkatan	100.000			Jumlah pemangku kepentingan /relawan muda yang dilatih	2 Angkatan	100.000	
9.	Penyusunan Rencana Kontijensi	Semarang	Jumlah dokumen renkon yang disusun	3 Dok	250.000	Penyusunan Rencana Kontijensi	Semarang	Jumlah dokumen renkon yang disusun	3 Dok	250.000	
10.	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	35 Kab/ Kota	jumlah masyarakat siaga bencana yang terlatih	450 Org	300.000	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	35 Kab/ Kota	jumlah masyarakat siaga bencana yang terlatih	450 Org	300.000	
III	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana										
1.	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	35 Kab/ Kota	jumlah sarana dan prasarana darurat yang tersedia/disiapkan	2 Keg	200.000	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	35 Kab/ Kota	jumlah sarana dan prasarana darurat yang tersedia/disiapkan	2 Keg	200.000	
2.	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	35 Kab/ Kota	Jumlah penyediaan logistik (bulan)	10 Jenis	500.000	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	35 Kab/ Kota	Jumlah penyediaan logistik (bulan)	10 Jenis	500.000	

No	Rancangan Awal RKPD				Pagu Indikatif (Rp.000)	Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana (Rp.000)	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian		Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Persentase dapur umum yang dilaksanakan	100%	50.000			Persentase dapur umum yang dilaksanakan	100%	50.000	
3.	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	35 Kab/ Kota	Jumlah pelatihan Pusdalops yang diselenggarakan	1 Keg	100.000	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	35 Kab/ Kota	Jumlah pelatihan Pusdalops yang diselenggarakan	1 Keg	100.000	
			Jumlah posko bencana yang diselenggarakan oleh provinsi dan kabupaten/kota	34 lokasi	200.000			Jumlah posko bencana yang diselenggarakan oleh provinsi dan kabupaten/kota	34 lokasi	200.000	
IV	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana										
1.	Sub Keg Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Semarang	Jumlah forum kerjasama yang diselenggarakan	1 Kegiatan	50.000	Sub Keg Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana		Jumlah forum kerjasama yang diselenggarakan	1 Kegiatan	50.000	
			Jumlah dokumen kajian perencanaan pemulihan	1 Dokumen	100.000			Jumlah dokumen kajian perencanaan pemulihan	1 Dokumen	100.000	

No	Rancangan Awal RKPD				Pagu Indikatif (Rp.000)	Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana (Rp.000)	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian		Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
V	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semarang	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	14 Bln	5.778.495	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semarang	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	14 Bln	5.778.495	
2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semarang	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	12 Bln	300.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semarang	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	12 Bln	300.000	
3.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semarang	Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semarang	Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan	-	-	
4.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Semarang	Jumlah dokumen laporan akuntansi perangkat Daerah			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Semarang	Jumlah dokumen laporan akuntansi perangkat Daerah	-	-	
5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran PD yang disusun			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran PD yang disusun			

No	Rancangan Awal RKPD				Pagu Indikatif (Rp.000)	Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana (Rp.000)	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian		Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VI	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										
1.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Semarang	Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	12 Bln	100.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Semarang	Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	12 Bln	100.000	
VII	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Semarang	Jumlah unit pakaian dinas yang diadakan	100 Unit	10.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Semarang	Jumlah unit pakaian dinas yang diadakan	100 Unit	10.000	
2.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semarang	Jumlah ASN yang mengikuti DIKLAT/Workshop/ Seminar	25 Org	10.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semarang	Jumlah ASN yang mengikuti DIKLAT/Workshop/ Seminar	25 Org	10.000	
3.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Semarang	Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi peraturan perundang-undangan	25 Org	10.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Semarang	Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi peraturan perundang-undangan	25 Org	10.000	
VIII	Administrasi Umum Perangkat Daerah										

No	Rancangan Awal RKPD				Pagu Indikatif (Rp.000)	Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana (Rp.000)	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian		Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semarang	Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bln	15.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semarang	Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bln	15.000	
2.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan kantor	12 Bln	35.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan kantor	12 Bln	35.000	
3.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Semarang	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	12 Bln	10.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Semarang	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	12 Bln	10.000	
4.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semarang	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	12 bln	65.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semarang	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	12 bln	65.000	
5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12 Bln	1.00.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12 Bln	1.00.000	

No	Rancangan Awal RKPD				Pagu Indikatif (Rp.000)	Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana (Rp.000)	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian		Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IX	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
1.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jateng	Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas operasional	-	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jateng	Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas operasional			
2.	Pengadaan Mebel	Jateng	Jumlah unit pengadaan meubelair	-	-	Pengadaan Mebel	Jateng	Jumlah unit pengadaan meubelair			
3.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jateng	Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jateng	Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin			
4.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jateng	Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jateng	Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
X	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semarang	Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	12 Bln	10.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semarang	Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	12 Bln	10.000	
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semarang	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	12 Bln	450.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semarang	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	12 Bln	450.000	

No	Rancangan Awal RKPD				Pagu Indikatif (Rp.000)	Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana (Rp.000)	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian		Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semarang	Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	12 Bln	2.375.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semarang	Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	12 Bln	2.375.000	
XI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semarang	Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semarang	Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan			
2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semarang	Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	12 Bln	430.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semarang	Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	12 Bln	430.000	
3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semarang	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12 Bln	45.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semarang	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12 Bln	45.000	

No	Rancangan Awal RKPD				Pagu Indikatif (Rp.000)	Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana (Rp.000)	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian		Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semaran g	Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	12 Bln	80.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semaran g	Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	12 Bln	80.000	
5.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semaran g	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	12 Bln	45.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semaran g	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	12 Bln	45.000	

Prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 juga dilakukan untuk mendukung prioritas pembangunan Nasional Tahun 2022. Dalam rangka menyukseskan visi misi Gubernur Jawa Tengah tahun 2018-2023, dan sejalan dengan tugas pokok dan fungsi bidang penanggulangan bencana, BPBD Provinsi Jawa Tengah berperan dan berkontribusi dalam melaksanakan misi ke 4, yaitu Menjadikan rakyat Jateng lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan. Korelasi dengan arah kebijakan pembangunan TA 2022 adalah sebagai berikut

Tabel 2.7
Sasaran dan Strategi

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
	Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan	Mewujudkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup Jawa Tengah yang lestari dan berkelanjutan	Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana.	a. Penguatan dan harmonisasi kebijakan penanggulangan bencana di daerah, b. penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel, c. penguatan upaya pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan daerah, d. peningkatan prasarana sarana mitigasi dan pengurangan risiko bencana, e. penguatan sistem kesiapsiagaan bencana; f. pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan pendekatan rekayasa sosial yang kolaboratif (<i>collaborative social engineering</i>) g. peningkatan kerjasama dan kemitraan antar daerah dan antar lembaga dalam upaya pengurangan risiko bencana, serta mendorong optimalisasi pelaksanaan standar pelayanan minimal

Fokus prioritas pada arah kebijakan PB tersebut adalah

1. Penyediaan logistik untuk mencukupi kebutuhan kabupaten/kota terdampak bencana;
2. Pemenuhan sarana dan prasarana peralatan PB;
3. Pengembangan *Early Warning System* bencana berbasis masyarakat;
4. Pengembangan masyarakat tangguh bencana;

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BPBD termasuk dalam urusan wajib pelayanan dasar. Menurut UU 23 tahun 2014 termasuk dalam urusan ketentaraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan social. Tujuan, sasaran, dan indicator sasaraan BPBD Provinsi Jawa Tengah pada dokumen RKPd tahun 2018 yang merupakan penjabaran dari target RPJMD yaitu (Tujuan) Meningkatkan Ketangguhan dalam PB dengan Sasaran Strategis yaitu Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Masyarakat dalam PB, dengan program Penyelenggaraan Penanggulangan

bencana. Kegiatan priortirtas BPBD Provinsi Jawa Tengah adalah pembentukan desa tangguh bencana dan sekaligus dipadukan dengan konsep desa berdikari. Target capaian desa tangguh bencana adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8
Target BPBD Pada RPJMD

No	Indikator Sasaran	Target RPJMD						Realisasi				
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Desa tangguh Bencana	25	27	29	30	60	68	46	44	52	60	68

Wilayah Jawa Tengah yang rawan dan berisiko terhadap bencana ditempati oleh masyarakat sebagai tempat tinggal. Permasalahan kepemilikan lahan dan tidak ada pilihan lokasi lain menjadi penyebab klasik sehingga sering terjadi korban yang cukup banyak ketika terjadi bencana. Upaya pendekatan kearifan lokal, melalui pembentukan Desa Tangguh Bencana diharapkan masyarakat memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan serta memperkecil jumlah masyarakat yang terdampak bencana.

2.5. Penelahaan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Jawa tengah dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha. Mekanisme perencanaan pembangunan telah dirancang agar dapat memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, sehingga dalam proses penyusunan rencana pembangunan telah ditempuh melalui beberapa mekanisme usulan, yaitu kegiatan musrenbang, aspirasi langsung kepada gubernur saat kujungan ke lapangan dan aspirasi melalui hasil Reses DPRD. Berdasarkan data Rancangan RKPD Provinsiinsi Jawa Tengah sesuai data usulan Program/ Kegiatan dari masyarakat, tidak terdapat usulan untuk Kegiatan Penyelenggaraan PB.

Tabel 2.9
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Provinsi Jawa Tengah

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Vol	Catatan Hasil Pengamatan	Usulan
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	

Seiring dengan keterbukaan informasi publik, dan pemanfaatan teknologi informasi, Pemerintah Provinsiinsi Jawa Tengah membuka beberapa sarana untuk membangun sinergi dan komunikasi pembangunan dengan masyarakat. Kanal yang dimanfaatkan oleh pemerintah Provinsiinsi jawa tengan antara lain melalui sms laporgub, website, media sosial (twitter, facebook, instagram, dll). Selain ditingkat pemerintah Provinsiinsi. Meskipun terhubung secara struktur, BPBD Provinsi Jawa Tengah juga

mempunyai kanal tersendiri melalui berbagai media yang dimanfaatkan untuk jalur komunikasi dua arah sehingga penanganan bencana di Jawa Tengah dapat berjalan dengan efektif, efisien, cepat, dan tanggap.

Mendasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019, maka untuk penganggaran APBD TA 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.10
Review Rancangan RKPD 2022 Permendagri 90/2019

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	RAPBD (Rp. 000)
1	2	3	4	5	6
	Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana				
I.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi				
1.	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	35 Kab/ Kota	Jumlah dokumen KRB yang disusun		
2.	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	35 Kab/ Kota	Jumlah desa yang teridentifikasi rawan bencana	60 Desa	1.250.000
II.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana				
1.	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Semarang	Jumlah dokumen RPB yang disusun	0 Dok	-
2.	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	36 Kab/ Kota	Jumlah Komunitas PB yang dilatih	5 Kel	385.000
3.	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	35 Kab/ Kota	Jumlah kegiatan pelatihan penggunaan peralatan PB yang diselenggarakan	1 Keg	100.000
			Jumlah penyediaan peralatan bencana (unit)	10 Unit	200.000
4.	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	35 Kab/ Kota	Jumlah EWS yang dipasang dan Rambu yang dipasang	33 Unit	300.000
5.	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	35 Kab/ Kota	Jumlah desa tangguh bencana terbentuk	7 Desa	400.000
6.	Penanganan Pascabencana Provinsi	35 Kab/ Kota	Jumlah kegiatan monev rehab rekon yang dilaksanakan	35 Kab/Kota	100.000
			Jumlah tenaga ahli terlatih dalam penghitungan kerusakan, kerugian dan kebutuhan pasca bencana	100 Org	150.000
8.	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	35 Kab/ Kota	jumlah masyarakat/relawan yang terlatih	2 Kel	100.000
			Jumlah pemangku kepentingan /relawan muda yang dilatih	2 Kel	100.000
9.	Penyusunan Rencana Kontijensi	Semarang	Jumlah dokumen renkon yang disusun	3 Dok	250.000
10.	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	35 Kab/ Kota	jumlah masyarakat siaga bencana yang terlatih	450 Org	300.000
III	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				
1.	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	35 Kab/ Kota	jumlah sarana dan prasarana darurat yang tersedia/disiapkan	2 Keg	100.000

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	RAPBD (Rp. 000)
1	2	3	4	5	6
2.	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	35 Kab/ Kota	Jumlah penyediaan logistik (bulan)	10 Jenis	500.000
			Persentase dapur umum yang dilaksanakan	100%	50.000
3.	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	35 Kab/ Kota	Jumlah pelatihan Pusdalops yang diselenggarakan	1 Keg	100.000
			Jumlah posko bencana yang diselenggarakan oleh provinsi dan kabupaten/kota	34 Lok	200.000
IV	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				
1.	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Semarang	Jumlah forum kerjasama yang diselenggarakan	1 Keg	50.000
			Jumlah dokumen kajian perencanaan pemulihan	1 Dok	100.000
V	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semarang	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	14 Bln	5.778.495
2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semarang	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	12 Bln	300.000
VI	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
1.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Semarang	Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	12 Bln	100.000
VII	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Semarang	Jumlah unit pakaian dinas yang diadakan	100 Unit	10.000
2.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semarang	Jumlah ASN yang mengikuti DIKLAT/Workshop/ Seminar	25 Org	10.000
3.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Semarang	Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi peraturan perundang-undangan	25 Org	10.000
VIII	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semarang	Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bln	15.000
2.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	12 Bln	35.000

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	RAPBD (Rp. 000)
1	2	3	4	5	6
3.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Semarang	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	12 Bln	10.000
4.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semarang	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	12 Bln	65.000
5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12 Bln	1.000.000
IX	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semarang	Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	12 Bln	10.000
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semarang	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	12 Bln	450.000
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semarang	Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	12 Bln	2.375.000
X	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semarang	Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	12 Bln	430.000
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semarang	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12 Bln	45.000
3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semarang	Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	12 Bln	80.000
4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semarang	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	12 Bln	45.000

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Penyelenggaraan penanggulangan bencana Indonesia berkembang sesuai dengan pembangunan Nasional. Arah kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan skala prioritas pembangunan jangka menengah. Skala prioritas ini termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Periode 2005-2025. Arah kebijakan RENAS PB 2020-2024 juga merupakan terjemahan Visi Penanggulangan Bencana 2020-2044 yaitu: "Mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk Pembangunan Berkelanjutan". Maka Arah Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana periode 2020-2024 adalah: "PENINGKATAN KETANGGUHAN BENCANA MENUJU KESEJAHTERAAN YANG BERKETAHANAN UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN"

Sehingga Visi BNPB 2020-2024 adalah: "Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana" dan Misi BNPB 2020-2024 adalah:

- 1) Melindungi bangsa dari ancaman bencana dengan membangun budaya pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana menjadi bagian yang terintegrasi dalam pembangunan nasional;
- 2) Membangun sistem penanganan darurat bencana secara cepat, efektif dan efisien;
- 3) Menyelenggarakan pemulihan wilayah dan masyarakat pasca bencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik yang terkoordinasi dan berdimensi pengurangan risiko bencana;
- 4) Menyelenggarakan dukungan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana;
- 5) Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara transparan dengan prinsip *good governance*.

Visi dan Misi tersebut merupakan gambaran terhadap apa yang ingin diwujudkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada akhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 yaitu bagaimana negara secara tangguh mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan menjauhkan masyarakat dari bencana dan meningkatkan kemampuan daya lenting masyarakat untuk pulih kembali dari dampak bencana.

Ketangguhan yang ingin diwujudkan adalah budaya hidup harmonis/berdampingan dengan ancaman bencana yang mampu mengantisipasi, mengadaptasi, memproteksi, serta menghindari/meminimalisir dampak bencana dan memiliki daya serap informasi. Ketangguhan masyarakat secara mandiri dalam penanggulangan bencana menjadi yang pertama dalam setiap upaya penanggulangan bencana.

Arah kebijakan RENAS PB 2020-2024 juga merupakan terjemahan Visi Penanggulangan Bencana 2020-2044 yaitu "Mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk Pembangunan Berkelanjutan".

Arah Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana periode 2020-2024 adalah "PENINGKATAN KETANGGUHAN BENCANA MENUJU KESEJAHTERAAN YANG BERKETAHANAN UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN"

Sesuai dengan arah kebijakan penanggulangan bencana nasional 2020-2024 yang berfokus kepada kesejahteraan masyarakat untuk pembangunan yang berkelanjutan, maka sasaran penanggulangan bencana diukur dengan penurunan kerugian ekonomi terhadap PDB.

Sasaran Nasional Penanggulangan Bencana adalah "MENURUNNYA KERUGIAN EKONOMI TERHADAP PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB) AKIBAT DAMPAK BENCANA"

Dalam *World Risk Report* (2016), Indonesia dikategorikan sebagai negara dengan tingkat risiko bencana yang tinggi. Hal tersebut disebabkan tingginya tingkat keterpaparan (*exposure*) dan kerentanan (*vulnerability*) terhadap bencana. Bahkan hampir 75% infrastruktur industri dan konektivitas dasar di Indonesia, termasuk sarana pendukungnya dibangun pada zona rawan bencana. Hal ini menyebabkan tingginya kemungkinan kerusakan pada aset infrastruktur yang meningkatkan pengeluaran operasional serta penambahan biaya akibat penyediaan layanan alternatif. Semua ini berdampak pada kinerja ekonomi yang diukur melalui Produk Domestik Bruto (PDB).

Pencapaian Sasaran Nasional Penanggulangan Bencana dilaksanakan dengan menerapkan Kebijakan Nasional penanggulangan bencana yang terdiri dari:

1. Penguatan dan Harmonisasi Sistem, Regulasi serta Tata Kelola PB yang efektif dan efisien, dengan strategi :
 - a. Penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana;
 - b. Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel;
2. Peningkatan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana, dengan strategi: Penerapan riset inovasi dan teknologi kebencanaan melalui integrasi kolaboratif multi pihak;

3. Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana, dengan strategi:
 - a. Peningkatan Sarana Prasarana Mitigasi dan Pengurangan Risiko Bencana;
 - b. Penguatan Sistem Kesiapsiagaan Bencana;
 - c. Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan pendekatan rekayasa sosial yang kolaboratif (*collaborative social engineering*);
 - d. Peningkatan perlindungan terhadap kerentanan lingkungan di daerah rawan bencana.
4. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal, dengan strategi Penguatan Sistem dan Operasionalisasi Penanganan Darurat Bencana;
5. Percepatan pemulihan daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik, dengan strategi Percepatan Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di daerah terdampak bencana.

Kebijakan dan strategi RENAS PB diturunkan dalam 27 aksi dan 119 indikator aksi, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah. Detail Rencana Aksi dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut.

Tabel 1.1
Fokus Prioritas, Aksi dan Indikator Aksi BNPB

NO	FOKUS PRIORITAS	AKSI	INDIKATOR
1	2	3	4
1.	Penguatan dan harmonisasi peraturan perundangundangan penanggulangan bencana;	Sinkronisasi dan harmonisasi Sistem, Regulasi dan Tata Kelola Bencana	1. Adanya perkuatan terhadap posisi strategis kelembagaan penanggulangan bencana di pusat dan daerah; 2. Adanya regulasi standar data dan kesamaan variabel dalam rangka penguatan data, informasi dan literasi bencana; 3. Adanya aturan dan mekanisme pengamanan/ pemeliharaan infrastruktur vital kebencanaan terutama untuk peralatan peringatan dini; 4. Tersusunnya regulasi Dana Bersama Penanggulangan Bencana; 5. Adanya dukungan teknis pengembangan sistem penanggulangan bencana; 6. Adanya sistem pengelolaan pelayanan pemerintahan pada saat tanggap darurat dan pasca bencana; 7. Tersusunnya regulasi

NO	FOKUS PRIORITAS	AKSI	INDIKATOR
1	2	3	4
			pengelolaan Daerah Tangkapan Air (DTA) di kawasan permukiman;
		Integrasi pengurangan risiko ke dalam kebijakan penataan ruang	8. Tersusunnya RPB dan master plan kawasan rawan bencana; 9. Adanya pemetaan dan analisis risiko bencana; 10. Adanya penguatan data pemetaan mikrozonasi kawasan rawan bencana geologi; 11. Terselenggaranya forum sinkronisasi analisis risiko mikro zonasi bencana dengan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah kawasan; 12. Adanya tata kelola DAS berbasis bentang alam (landscape) dan risiko bencana; 13. Adanya penegakan rencana tata ruang yang berbasis bentang alam untuk mitigasi bencana geologi melalui peningkatan efektifitas pengendalian pemanfaatan ruang; 14. Adanya strategi percepatan pengelolaan dan pengendalian pendirian bangunan di tingkat kabupaten/kota.
2	Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel	Peningkatan jangkauan akses penyebaran informasi bencana melalui pelengkapan, pemutakhiran, dan standarisasi Data dan Informasi Bencana	15. Adanya penguatan data dan peta risiko bencana pada kawasan strategis nasional dan kawasan industri dan kawasan pariwisata prioritas dengan pendekatan mikrozonasi dengan tetap memperhatikan pendekatan integrasi kewilayahan (contoh: DAS, kawasan geopark, dll); 16. Meningkatnya pengelolaan database dan teknologi informasi kebencanaan yang saling terintegrasi dan terhubung dengan database penduduk miskin dan rentan di tingkat nasional dan daerah; 17. Terbangunnya Satu Data Bencana Terintegrasi; 18. Adanya kemudahan akses informasi melalui data base kebencanaan yang mudah

NO	FOKUS PRIORITAS	AKSI	INDIKATOR
1	2	3	4
			digunakan masyarakat; 19. Tersedianya data base desa tangguh berdasarkan penilaian ketangguhan desa;
		Pelengkapan, pemutakhiran, dan standarisasi Literasi Bencana	20. Adanya penguatan data untuk peningkatan literasi terkait lingkungan hidup 21. Terlaksananya dukungan bimtek, pendidikan/ pelatihan teknis dan simulasi PB daerah; 22. Adaya dukungan peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana di daerah tertinggal; 23. Adanya digitalisasi literasi kebencanaan dari semua stakeholders terkait untuk perubahan perilaku dan pembelajaran pengurangan risiko bencana;
		Integrasi pengurangan risiko ke dalam rencana jangka panjang dan menengah nasional dan daerah	24. Adanya Monev RENAS PB 2020-2024; 25. Adanya kebijakan PRB dalam prioritas pembangunan di daerah; 26. Meningkatnya alokasi anggaran dan kualitas program kegiatan PB daerah;
		Penerapan SPM Sub Urusan Bencana	27. Diterapkannya SPM Sub Urusan Bencana oleh pemerintah daerah; 28. Adanya monev, asistensi dan supervisi penerapan standar pelayanan minimal bidang bencana; 29. Diberikannya Bimbingan Teknis pengintegrasian dokumen terkait PB ke dalam dokumen perencanaan dan pembangunan daerah; 30. Sinkronisasi perencanaan program dan kegiatan SPM Sub-Urusan Bencana; 31. Pemberian Bimbingan Teknis penyusunan dokumen kebencanaan (Dokumen KRB, RPB dan Renkon) yang dimandatkan oleh SPM sub-Urusan Bencana;

NO	FOKUS PRIORITAS	AKSI	INDIKATOR
1	2	3	4
		Penguatan sarana prasarana pelatihan dan standarisasi kompetensi bidang kebencanaan. (termasuk modul pelatihan)	32. Adanya sarana prasarana pelatihan kebencanaan; 33. Adanya standarisasi kompetensi bidang kebencanaan;
3	Penerapan riset inovasi dan teknologi kebencanaan melalui integrasi kolaboratif multi pihak	Pemberdayaan riset dan teknologi terapan dalam pengurangan risiko bencana	34. Adanya riset pengembangan Risk Culture melalui peningkatan pengetahuan kebencanaan yang terintegrasi; 35. Adanya teknologi terapan untuk pencegahan, mitigasi bencana; 36. Adanya teknologi terapan untuk perkuatan kapasitas sistem peringatan dini bencana;
		Pengembangan konsep inovasi skema alternatif pembiayaan PB dengan pendekatan integrasi kolaboratif multi pihak	37. Adanya kolaborasi multipihak dalam alternatif pembiayaan PB; 38. Dikembangkannya kerangka kerja dan kebijakan asuransi bencana (risk transfer) dan pembiayaan risiko (risk financing);
4	Peningkatan Sarana Prasarana Mitigasi dalam Pengurangan Risiko Bencana;	Pengembangan kebijakan wilayah untuk ketahanan bencana dan penguatan infrastruktur vital tahan bencana	39. Adanya peta risiko dan rencana induk ketahanan wilayah dan infrastruktur vital terhadap bencana; 40. Adanya rencana pengelolaan terpadu kawasan pesisir; 41. Adanya aturan tentang penataan bangunan dan lingkungan; 42. Dilakukannya pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan; 43. Meningkatnya fasilitasi penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan risiko bencana hidrometeorologi, geologi, dan lingkungan; 44. Integrasi hasil kajian risiko bencana ke dalam RDTR; 45. Persyaratan Analisis risiko bencana untuk pembangunan besar;
		Pembangunan dan peningkatan infrastruktur pendukung ketahanan bencana	46. Terlaksananya normalisasi dan peningkatan kapasitas aliran sungai; 47. Terbangunnya infrastruktur hijau, penahan longsor, kolam retensi multi fungsi, check dam, sabo dam, di wilayah sungai prioritas/kritis dan wilayah berisiko tsunami;

NO	FOKUS PRIORITAS	AKSI	INDIKATOR
1	2	3	4
			48. Terbangunnya Infrastruktur sistem drainase utama perkotaan (kanal banjir, polder, pompa, dsb); 49. Dibangun dan optimalnya fungsi tanggul laut, breakwater, dan bangunan pengamanan pantai lainnya; 50. Dibangun dan optimalnya ketahanan infrastruktur vital terhadap risiko bencana; 51. Adanya pengembangan bandara di daerah terisolir, perbatasan dan rawan bencana; 52. Terbangunnya rencana dan pengelolaan risiko bencana pada Destinasi Wisata Prioritas.
5	Penguatan Sistem Kesiapsiagaan Bencana;	Perkuatan sistem peringatan dini terpadu dan tanggap darurat bencana yang terintegrasi dengan Sistem Ketahanan Kesehatan Masyarakat	53. Adanya sistem peringatan dini terpadu Multi Ancaman dan data center hidrometeoro-logi, khususnya banjir, longsor, dan kekeringan; 54. Meningkatnya ketangguhan sistem peringatan dini bencana geologi; 55. Adanya radio tanggap darurat bencana; 56. Adanya hasil Riset Interdisiplin Indonesia Early Warning System (InaTEWS); 57. Adanya sekolah lapangan untuk memberikan pemahaman masyarakat tentang peringatan dini bencana; 58. Adanya sistem penyediaan data hotspot untuk penanggulangan Karhutla;
		Peningkatan Sarana Prasarana Logistik Kebencanaan yang terintegrasi dengan Sistem Ketahanan Kesehatan Masyarakat	59. Terpenuhinya dan terdistribusinya logistik PB secara optimal; 60. Terpenuhinya dan terdistribusinya peralatan PB secara optimal; 61. Terpenuhinya sarana prasarana penanganan darurat dan pemulihan sosial korban bencana; 62. Adanya pembentukan dan pembinaan klaster logistik tingkat daerah; 63. Adanya pemetaan jejaring dukungan kapasitas logistik terintegrasi pusat dan daerah guna mendukung operasi darurat; 64. Adanya protokol jalur

NO	FOKUS PRIORITAS	AKSI	INDIKATOR
1	2	3	4
			distribusi logistik bebas virus;
6	Pembedayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan pendekatan rekayasa sosial yang kolaboratif (collaborative social engineering);	Perkuatan ketangguhan bencana berbasis komunitas	65. Optimalitas penerapan Desa Tangguh Bencana dan Keluarga Tangguh Bencana; 66. Optimalitas Sekolah/Madrasah Aman Bencana - Satuan Pendidikan Aman Bencana;
		Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas Pemerintah, Swasta dan Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup	67. Terbentuknya satuan pendidikan formal dan lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup; 68. Adanya peningkatan kapasitas Lembaga/Forum Peduli DAS; 69. Terbentuknya desa mandiri peduli gambut di provinsi prioritas restorasi gambut dan provinsi rawan Karhutla;
		Perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	70. Meningkatnya kapasitas SDM Penyedia Layanan yang dilatih dalam menyelenggarakan Perlindungan Anak dari Eksploitasi di Lokasi Kebencanaan; 71. Meningkatnya keterlibatan dan partisipasi remaja dalam tanggap darurat/ pengurangan risiko bencana/ pengembangan komunitas; 72. Adanya penguatan kesiapsiagaan dan respon dalam perlindungan anak dalam keadaan darurat;
		Peningkatan peran dan perlindungan perempuan serta kelompok disabilitas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	73. Adanya dukungan kelembagaan dan layanan pemberdayaan perempuan dan kelompok disabilitas dalam penanggulangan bencana; 74. Adanya pedoman perempuan dan kelompok disabilitas tangguh bencana; 75. Meningkatnya pengetahuan dan kapasitas perempuan dan kelompok disabilitas tangguh bencana melalui berbagai media KIE; 76. Terinisiasinya penyelenggaraan PB dan Pengembangan Sosio-

NO	FOKUS PRIORITAS	AKSI	INDIKATOR
1	2	3	4
			Ekonomi yang Inklusif; 77. Terlaksananya penguatan kemitraan OMS dan Organisasi Penyadang Disabilitas dalam PB; 78. Adanya penguatan kebijakan dan praktik pemerintah dalam PB dan pengembangan sosio-ekonomi yang inklusif;
	Peningkatan perlindungan terhadap kerentanan lingkungan di daerah rawan bencana	Integrasi hasil kajian risiko bencana ke dalam KLHS	79. Tersusunnya KLHS yang memperhatikan hasil kajian risiko bencana; 80. Digunakannya KLHS dalam penyusunan perencanaan penanggulangan bencana di tingkat nasional maupun daerah;
		Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut	81. Adanya dukungan koordinasi dan fasilitasi restorasi gambut provinsi rawan kebakaran hutan; 82. Pulihnya degradasi lahan gambut masyarakat; 83. Meningkatnya tata kelola air pada kawasan rawa dan gambut di daerah rawan bencana Karhutla;
		Perlindungan Ketahanan Pangan terhadap Perubahan Iklim	84. Adanya penanganan ketahanan pangan terhadap dampak perubahan iklim dan Karhutla;
		Perlindungan Ketahanan Air pada Wilayah Berisiko Iklim	85. Meningkatnya keterpenuhan persediaan air minum di Kawasan Rawan Air; 86. Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Vegetatif untuk perlindungan air baku; 87. Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan Secara Sipil Teknis; 88. pada hutan produksi baik melalui reforestasi maupun pembangunan pertanian yg responsif terhadap risiko bencana;
		Inventarisasi dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir, Kelautan, dan Hutan Mangrove	89. Terlaksananya Rehabilitasi Hutan Mangrove; 90. Terlaksananya rehabilitasi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil; 91. Adanya penguatan kelompok kerja mangrove dan forum peduli mangrove;

NO	FOKUS PRIORITAS	AKSI	INDIKATOR
1	2	3	4
8	Penguatan Sistem dan Operasionalisasi Penanganan Darurat Bencana;	Optimalisasi sistem penanggulangan kedaruratan bencana yang terintegrasi dengan Sistem Ketahanan Kesehatan Masyarakat	92. Adanya rencana penanggulangan kedaruratan bencana yang mempertimbang--kan aspek Sosio Culture yang berkembang di masyarakat; 93. Adanya Rencana Kontinjensi Nasional untuk bencana-bencana prioritas; 94. Terkelolanya infrastuktur penanganan darurat secara optimal; 95. Adanya penguatan implelementasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana; 96. Adanya penguatan penanggulangan krisis kesehatan; 97. Terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana berdasarkan data base kebutuhan dan bantuan kedaruratan bencana; 98. Terkelolanya dana bantuan kedaruratan; 99. Adanya dampingan terhadap penanganan korban dan pengungsi;
		Pemaduan sumber daya dalam operasi pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban	100. Adanya pemenuhan peralatan pendukung operasi SAR; 101. Adanya pembangunan prasarana pendukung operasi SAR; 102. Adanya Pengerahan Potensi dan Pengendalian Operasi SAR; 103. Adanya pemenuhan Sistem Komunikasi SAR;
		Pengendalian penyakit menular	104. Adanya respon peringatan dini KLB Penyakit menular/zoonosis; 105. Meningkatnya kapasitas implementasi sistem kekarantinaan kesehatan; 106. Terlaksananya pencegahan dan pengendalian penyakit menular; 107. Terlaksananya Promosi kesehatan dan perilaku hidup bersih; 108. Adanya penguatan pengembangan penelitian, inovasi pengobatan, dan vaksin virus penyakit menular; 109. Meningkatnya jumlah wilayah hijau Pandemi;

NO	FOKUS PRIORITAS	AKSI	INDIKATOR
1	2	3	4
9	Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di daerah terdampak bencana;	Dukungan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana	110. Terbangunnya pembangunan infrastruktur air minum, sanitasi, drainase, dan persampahan terpadu pada kawasan Huntara dan Huntap; 111. Pemulihan sektor-sektor produktif terdampak bencana; 112. Revitalisasi Pasar Rakyat di Daerah Tertinggal, Perbatasan, & Rawan Bencana; 113. Adanya dukungan pemulihan fisik/bangunan terdampak bencana;
		Penerapan perlindungan sosial yang adaptif	114. Adanya bantuan langsung tunai bersyarat bagi masyarakat miskin terdampak bencana; 115. Terdistribusinya bantuan bencana alam/sosial bagi sekolah terdampak bencana; 116. Adanya dukungan pemulihan sosial ekonomi terdampak bencana; 117. Adanya peningkatan kapasitas mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat di daerah rawan bencana dan masyarakat korban bencana; 118. Adanya perlindungan sosial bagi masyarakat di kawasan rawan bencana dan masyarakat korban bencana; 119. Meningkatnya kapasitas ekonomi dan livelihood masyarakat terdampak bencana;

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

Sejalan dengan Visi Pembangunan Jawa Tengah sebagaimana dalam RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 yaitu **“Jawa Tengah Yang Mandiri, Maju, Sejahtera dan Lestari”** maka tujuan BPBD Provinsi Jawa Tengah adalah **Mewujudkan Masyarakat Jawa Tengah Yang Tangguh Dalam Penanggulangan Bencana**, dan sasaran yang akan dicapai BPBD Provinsi Jawa Tengah antara lain:

1. Meningkatnya upaya pencegahan, kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana;
2. Meningkatnya kapasitas penyelamatan dan penanganan masyarakat terdampak bencana;
3. Meningkatnya kapasitas dan upaya pemulihan pasca bencana;

4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana peralatan dan logistik bencana;
5. Meningkatnya kapasitas pelayanan, kinerja dan kerjasama penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran BPBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan ketangguhan masyarakat Jawa Tengah dalam penanggulangan bencana.		Indeks Ketahanan Daerah.	angka	3.56
		Meningkatnya upaya mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana.	Persentase penambahan kapasitas PB diwilayah rawan bencana.	%	5
		Meningkatnya kapasitas penyelamatan dan penanganan masyarakat terdampak bencana.	Persentase penambahan kapasitas relawan TRC/pemangku kepentingan PB.	%	3
		Meningkatnya kapasitas dan upaya pemulihan pasca bencana.	Persentase pemulihan pasca bencana yang terealisasi.	%	100
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana peralatan dan logistik bencana.	Persentase kecukupan kebutuhan dasar dan peralatan masyarakat terdampak yang terpenuhi.		100
2	Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah.		Nilai Kepuasan Masyarakat.	angka	85
		Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah.	Nilai kepuasan masyarakat.	angka	85
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.	Nilai Sakip BPBD Prov. Jateng.	angka	68

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tahun 2022, alokasi APBD pada BPBD Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp 37.665.000.000,- (tiga puluh tujuh milyar enam ratus enam puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari 2 Program dan 11 (sebelas) Kegiatan. Ringkasan program dan kegiatan beserta indikator, target dan pagu indikatif anggaran tersebut dituangkan dalam tabel berikut.

Tabel 4.1
Program dan Kegiatan BPBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RAPBD	
		TA 2022	Ket
1	2	6	5
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA	16,150,000,000	
I.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi		
1.	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	400,000,000	1 dok
2.	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	1,700,000,000	60 Desa
II.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		
1.	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	-	0 Dok
2.	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	1,000,000,000	10 Kel
3.	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	300,000,000	1 Keg
		200,000,000	10 Unit
4.	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	2,900,000,000	265 Unit
5.	Pengelolaan Risiko Bencana	300,000,000	1 Keg
6.	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	2,500,000,000	30 Desa
7.	Penanganan Pascabencana Provinsi	200,000,000	35 Kab/Kota
		300,000,000	100 Org
8.	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	500,000,000	7 Kel
		350,000,000	5 Kel
9.	Penyusunan Rencana Kontijensi	600,000,000	3 Dok
10.	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	600,000,000	300 Org
III	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		
1.	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	400,000,000	4 Keg
2.	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2,000,000,000	10 Jenis
		100,000,000	100%
3.	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	300,000,000	1 Keg
		500,000,000	1 Lok
IV	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		
1.	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam PB	200,000,000	1 dok
		300,000,000	1 keg
2.	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	200,000,000	1 Unit
3.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	300,000,000	1 Keg
		-	

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RAPBD	
		TA 2022	Ket
1	2	6	5
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PD	21,515,000,000	
V	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10,800,000,000	14 Bln
2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2,500,000,000	14 Bln
3.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100,000,000	12 Bln
4.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	50,000,000	0 Dok
5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100,000,000	0 Lap
VI	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
1.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	300,000,000	12 Bln
VII	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	50,000,000	100 Unit
2.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100,000,000	50 Org
3.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200,000,000	50 Org
VIII	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	200,000,000	12 Bln
2.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	200,000,000	12 Bln
3.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	320,000,000	12 Bln
4.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	300,000,000	12 Bln
5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2,000,000,000	12 Bln
IX	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
1.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	0 Unit
2.	Pengadaan Mebel	-	0 Unit
3.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100,000,000	17 Unit
4.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	175,000,000	12 Unit
X	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20,000,000	12 Bln
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	700,000,000	12 Bln
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	600,000,000	12 Bln
XI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	300,000,000	12 Bln
2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	700,000,000	12 Bln
3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	300,000,000	12 Bln

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RAPBD	
		TA 2022	Ket
1	2	6	5
4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	600,000,000	3 Unit
5.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	300,000,000	12 Bln
XII	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
1.	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	300,000,000	5 dok
2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	200,000,000	5 dok
	TOTAL	37,665,000,000	

Tabel 4.1

Rumusan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Perkiraan Maju Tahun 2022 Provinsi Jawa Tengah

BPBD PROVINSI JAWA TENGAH

[illegible]

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2022	Prakiraan Maju Tahun 2023		Lokasi	OPD Penanggungjawab/ Unit Kerja
						Capaian Program		Keluaran		Hasil			Rp. (000)	Target		
				Uraian	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN		Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	14 bulan	2.500.000	14 bulan	3.000.000		
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan		Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan	12 bulan	100.000	12 bulan	200.000		
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD							Jumlah dokumen laporan akuntansi perangkat Daerah		Jumlah dokumen laporan akuntansi perangkat Daerah	Dok	50.000	Dok	100.000		

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2022	Prakiraan Maju Tahun 2023		Lokasi	OPD Penanggungjawab/ Unit Kerja
				Uraian	Target	Capaian Program		Keluaran		Hasil		Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran PD yang disusun		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran PD yang disusun	Lap	100.000	Lap	100.000		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah															
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD							Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah		Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	12 Bulan	300.000	12 Bulan	300.000	BPBD Prov Jateng	BPBD Prov Jateng/Sub Bag Umum & Kepegawaian
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah															
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya							Jumlah unit pakaian dinas yang diadakan		Jumlah unit pakaian dinas yang diadakan	100 unit	50.000	100 unit	50.000	BPBD Prov Jateng	BPBD Prov Jateng/Sub Bag Umum & Kepegawaian

[illegible]

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2022	Prakiraan Maju Tahun 2023		Lokasi	OPD Penanggungjawab/ Unit Kerja
				Uraian	Target	Capaian Program		Keluaran		Hasil		Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	200.000	12 Bulan	300.000	BPBD Prov Jateng	BPBD Prov Jateng/Sub Bag Umum & Kepegawaian
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor		Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	12 Bulan	200.000	12 Bulan	200.000	BPBD Prov Jateng	BPBD Prov Jateng/Sub Bag Umum & Kepegawaian

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2022	Prakiraan Maju Tahun 2023		Lokasi	OPD Penanggungjawab/ Unit Kerja
				Uraian	Target	Capaian Program		Keluaran		Hasil		Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD		Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	12 Bulan	320.000	12 Bulan	400.000	BPBD Prov Jateng	BPBD Prov Jateng/Sub Bag Umum & Kepegawaian
	Fasilitasi Kunjungan Tamu							Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu		Jml bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	12 Bulan	300.000	12 Bulan	300.000		BPBD Prov Jateng/Sub Bag Keuangan

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pemban gunan Daerah	Prioritas Pemban gunan Nasional	Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2022	Prakiraan Maju Tahun 2023		Lokasi	OPD Penanggun gjawab/ Unit Kerja
						Capaian Program		Keluaran		Hasil		Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
				Uraian	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							Jumlah bulan terpenuh inya pelaksana aan rapat-rapat koordina si dan konsulta si ke dalam dan luar daerah		Jumlah bulan terpenuhi nya pelaksana an rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12 Bulan	2.000.000	12 Bulan	2.000.000		BPBD Prov Jateng/Sub Bag Umum & Kepegawaia n
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							Jumlah unit pengada an kendara an dinas operasio nal		Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas operasiona l	unit	-	unit	-		BPBD Prov Jateng/Sub Bag Umum & Kepegawaia n

[illegible]

[illegible]

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2022	Prakiraan Maju Tahun 2023		Lokasi	OPD Penanggungjawab/ Unit Kerja
				Uraian	Target	Capaian Program		Keluaran		Hasil		Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	12 bulan	300.000	12 bulan	300.000		BPBD Prov Jateng/Sub Bag Umum & Kepegawaian
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional		Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	12 bulan	700.000	12 bulan	700.000		BPBD Prov Jateng/Sub Bag Umum & Kepegawaian

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2022	Prakiraan Maju Tahun 2023		Lokasi	OPD Penanggungjawab/ Unit Kerja
				Uraian	Target	Capaian Program		Keluaran		Hasil		Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12 bulan	300.000	12 bulan	250.000		BPBD Prov Jateng/Sub Bag Umum & Kepegawaian
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							Jumlah Unit Gedung Yang Direhab		Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	3 unit	600.000	3 unit	600.000		BPBD Prov Jateng/Sub Bag Umum & Kepegawaian
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor		Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	12 bulan	300.000	12 bulan	300.000		BPBD Prov Jateng/Sub Bag Umum & Kepegawaian

[illegible]

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2022	Prakiraan Maju Tahun 2023		Lokasi	OPD Penanggungjawab/ Unit Kerja
				Uraian	Target	Capaian Program		Keluaran		Hasil		Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi							Jumlah dokumen KRB yang disusun		Jumlah dokumen KRB yang disusun	3 dok	400.000	3 dok	400.000		BPBD Prov Jateng/Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)							Jumlah desa yang teridentifikasi rawan bencana		Jumlah desa yang teridentifikasi rawan bencana	60 desa	1.700.000	60 desa	1.700.000		BPBD Prov Jateng/Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana															
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana							Jumlah dokumen RPB yang disusun		Jumlah dokumen RPB yang disusun	dok	-	1 dok	200.000		BPBD Prov Jateng/Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana							Jumlah Komunitas PB yang dilatih		Jumlah Komunitas PB yang dilatih	10 Kelompok	1.000.000	10 Kelompok	1.000.000		BPBD Prov Jateng/Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2022	Prakiraan Maju Tahun 2023		Lokasi	OPD Penanggun gjawab/ Unit Kerja
				Uraian	Target	Capaian Program		Keluaran		Hasil		Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana							Jumlah kegiatan pelatihat n penggun aan peralata n PB yang diselengg arakan	1 keg	Jumlah kegiatan pelatihan penggunaa n peralatan PB yang diselengga rakan	1 keg	300.000	1 keg	300.000		BPBD Prov Jateng/Bida ng Peralatan dan Logistik
								Jumlah penyedia an peralata n bencana (unit)	10 unit	Jumlah penyediaa n peralatan bencana (unit)	10 unit	200.000	10 unit	200.000		
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana							Jumlah EWS yang dipasang dan Rambu yang dipasang		Jumlah EWS yang dipasang dan Rambu yang dipasang	265 unit	2.900.000	265 unit	2.900.000		BPBD Prov Jateng/Bida ng Pencegahan dan Kesiapsiaga an

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2022	Prakiraan Maju Tahun 2023		Lokasi	OPD Penanggungjawab/ Unit Kerja
				Uraian	Target	Capaian Program		Keluaran		Hasil		Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Pengelolaan Risiko Bencana							Jumlah kegiatan pengelolaan risiko bencana yang diselenggarakan		Jumlah kegiatan pengelolaan risiko bencana yang diselenggarakan	1 keg	300.000	1 keg	300.000		
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana							Jumlah desa tangguh bencana terbentuk		Jumlah desa tangguh bencana terbentuk	30 desa	2.500.000	30 desa	2.500.000	35 kab/kota	BPBD Prov Jateng/Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
	Penanganan Pascabencana Provinsi							Jumlah kegiatan monev rehab rekon yang dilaksanakan	35 kab/kota	Jumlah kegiatan monev rehab rekon yang dilaksanakan	35 kab/kota	200.000	35 kab/kota	200.000	35 kab/kota	BPBD Prov Jateng/Bidang Rehabilitasi & Rekonstruksi

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2022	Prakiraan Maju Tahun 2023		Lokasi	OPD Penanggungjawab/ Unit Kerja
				Uraian	Target	Capaian Program		Keluaran		Hasil		Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
								Jumlah tenaga ahli terlatih dalam penghitungan kerusakan, kerugian dan kebutuhan pasca bencana	100 org	Jumlah tenaga ahli terlatih dalam penghitungan kerusakan, kerugian dan kebutuhan pasca bencana	100 org	300.000	100 org	300.000		
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana							jumlah masyarakat/relawan yang terlatih	7 kel	jumlah masyarakat/relawan yang terlatih	7 kel	500.000	7 kel	500.000		BPBD Prov Jateng/Bidang Penanganan Darurat
								Jumlah pemangku kepentingan /relawan muda yang dilatih	5 kel	Jumlah pemangku kepentingan /relawan muda yang dilatih	5 kel	350.000	5 kel	350.000		

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2022	Prakiraan Maju Tahun 2023		Lokasi	OPD Penanggungjawab/ Unit Kerja
				Uraian	Target	Capaian Program		Keluaran		Hasil		Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Penyusunan Rencana Kontijensi							Jumlah dokumen renkon yang disusun	dok	Jumlah dokumen renkon yang disusun	3 dok	600.000	3 dok	600.000	35 kab/kota	BPBD Prov Jateng/Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana							jumlah masyarakat siaga bencana yang terlatih	300 org	jumlah masyarakat siaga bencana yang terlatih	300 org	600.000	300 org	600.000	35 kab/kota	BPBD Prov Jateng/Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana															
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana							jumlah sarana dan prasarana darurat yang tersedia/disiapkan	4 keg	jumlah sarana dan prasarana darurat yang tersedia/disiapkan	4 keg	400.000	4 keg	400.000		BPBD Prov Jateng/Bidang Penanganan Darurat
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban							Jumlah penyediaan logistik (bulan)	10 jenis	Jumlah penyediaan logistik (bulan)	10 jenis	2.000.000	10 jenis	2.000.000		BPBD Prov Jateng/Bidang Logistik dan Peralatan

[illegible]

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2022	Prakiraan Maju Tahun 2023		Lokasi	OPD Penanggungjawab/ Unit Kerja
				Uraian	Target	Capaian Program		Keluaran		Hasil		Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana							Jumlah dokumen kajian perencanaan pemulihan	1 dok	Jumlah dokumen kajian perencanaan pemulihan	1 dok	200.000	1 dok	200.000		BPBD Prov Jateng/Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
								Jumlah forum kerjasama yang diselenggarakan	1 keg	Jumlah forum kerjasama yang diselenggarakan	1 keg	300.000	1 keg	300.000		
	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan							Jumlah sistem informasi kebencanaan yang dikelola	1 unit	Jumlah sistem informasi kebencanaan yang dikelola	1 unit	200.000	1 unit	200.000		

Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional	Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2022	Prakiraan Maju Tahun 2023		Lokasi	OPD Penanggungjawab/ Unit Kerja
				Uraian	Target	Capaian Program		Keluaran		Hasil		Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi							Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan akan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	1 keg	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	1 keg	300.000	1 keg	300.000		

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) BPBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 merupakan rencana kerja untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Kerja ini dapat mengalami perubahan seiring dengan perubahan kondisi, sesuai dengan kebijakan dan prioritas pembangunan. Sebagai sebuah dokumen rencana, setiap tahapan telah diusahakan untuk memperhatikan dan mempertimbangkan perkembangan situasi terkini. Namun apabila terdapat situasi-situasi yang masih belum diperhitungkan atau berpengaruh pada perjalanan dokumen ini, maka dokumen rencana ini dapat ditinjau kembali untuk perbaikan dan penyesuaian kondisi.

Peninjauan kembali dapat dilakukan apabila terjadi perubahan terkait kebijakan di tingkat nasional maupun provinsi yang berpengaruh terhadap strategi dan pemanfaatan ruang provinsi dan/atau dinamika internal provinsi.

Dokumen RENJA BPBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 dijadikan sebagai acuan dan pedoman dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Hasil dari penyelenggaraan program dan kegiatan yang telah disusun diharapkan dapat terealisasi dan memberikan kontribusi positif serta bermanfaat bagi masyarakat Jawa Tengah yang lebih mandiri dan tangguh menghadapi bencana.

Salam Tangguh dan Salam Kemanusiaan.

Mengetahui,
Plt. Kalakhar
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Jawa Tengah

Ir. SAFRUDIN, M.Si
NIP. 196906031994031007